



BUPATI BALANGAN

Paringin, 10 Juli 2024

Kepada :

Yth. Gubernur Provinsi Kalsel
Cq. Kepala Bappeda Provinsi Kalsel
di –

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 050/1135/BAPPERIDA-BLG/2024

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penyampaian Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Balangan Triwulan II Tahun Anggaran 2024	1 berkas	Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom.

Rekapitulasi Evaluasi RKPD Kabupaten Balangan
Triwulan II Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2024)		Realisasi Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi Pada Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)			
1	2	3			5			
		K	APBD (Rp)		K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (%)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	22.238.193.977	2.913.728.170	59,98	81,27	34,57	13%
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	52.402.861.798	35.315.896.258	40,18	80,3	85,64	67%
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	21.704.504.771	7.384.834.869	53,33	63,42	71,57	34%
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100	503.510.896.208	139.171.809.831	53,21	45,06	141,49	28%
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	100	21.022.804.379	8.455.226.392	23,28	39,21	60,11	40%
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	100	45.360.334.931	16.110.292.398	48,56	65,7	78,48	36%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2024)		Realisasi Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi Pada Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)			
1	2	3			5			
		K	APBD (Rp)	APBD (Rp)	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (%)
7	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	100	9.690.128.556	3.812.693.840	44,32	55,21	95,35	39%
8	Dinas Kesehatan	100	311.436.628.703	100.697.429.303	49,75	66,95	101,01	32%
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	100	257.012.828.823	58.251.929.042	41,15	26,86	89,28	23%
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100	33.421.610.978	13.137.777.961	54,14	41,18	57,93	39%
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	100	45.460.183.518	33.550.392.881	69,74	7,11	15,42	74%
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	812.276.037.897	43.094.783.668	21,07	45,59	75,82	5%
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	32.205.658.847	23.008.501.137	72,01	33,27	20,2	71%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	11.639.676.442	4.229.074.131	55,03	59,58	77,77	36%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2024)		Realisasi Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi Pada Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)			
1	2	3			5			
		K	APBD (Rp)	APBD (Rp)	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (%)
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	527.352.373.956	138.701.134.890	29,42	40,42	87,82	26%
16	Dinas Perhubungan	100	66.823.400.754	26.277.190.875	30,29	52,32	81,31	39%
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	28.023.124.600	9.802.404.869	46,73	35,94	14,29	35%
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	18.338.696.828	6.212.693.095	47,66	59,4	49,24	34%
19	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100	38.547.781.581	11.362.745.397	20,3	30,73	32,73	29%
20	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	100	18.373.734.587	8.821.235.543	51,27	54,62	74,09	48%
21	Dinas Sosial	100	39.438.607.614	9.802.404.869	46,73	35,94	14,29	25%
22	Inspektorat	100	25.351.175.170	8.415.076.905	39,26	42,64	0	33%
23	Kecamatan Lampihong	100	6.091.304.823	3.270.887.694	67,93	31,94	98,65	54%
24	Kecamatan Awayan	100	5.349.469.257	2.703.037.413	60,64	49,24	36,74	51%
25	Kecamatan Batumandi	100	6.331.679.488	3.118.000.855	49,02	23,92	50	49%
26	Kecamatan Halong	100	5.773.865.401	2.821.046.558	55,2	58,8	16,61	49%
27	Kecamatan Juai	100	5.671.808.980	2.500.076.464	68,35	50,42	17,95	44%
28	Kecamatan Paringin	100	12.090.585.914	4.943.956.430	24,85	48,08	19,19	41%
29	Kecamatan Paringin Selatan	100	9.482.009.519	3.707.234.742	37,89	57,69	33,33	39%
30	Kecamatan Tebing Tinggi	100	4.809.105.147	2.239.541.096	60,93	50,93	17,91	47%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2024)		Realisasi Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi Pada Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)			
1	2	3			5			
		K	APBD (Rp)	APBD (Rp)	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (%)
31	Sekretariat Daerah	100	242.078.714.321	122.406.815.160	63,7	21,3	10	51%
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100	81.342.648.216	30.975.763.342	46,72	69,69	98,05	38%
		100	3.320.652.435.984	887.215.616.078	47,19	48,61	52,11	27%
					RENDAH	RENDAH	RENDAH	SANGAT RENDAH

Paringin, 10 Juli 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom.

RINGKASAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BALANGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69 Nilai	9.255.157.777	71,55 Nilai	3.872.789.654	(1) Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; (2) Ketersediaan sumber daya, baik SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarana penunjang, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan (3) Komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik dengan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders) urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Tidak meratanya pengetahuan serta rendahnya kesadaran aparatur terhadap implementasi SAKIP SKPD	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Implementasi Manajemen Talenta Pegawai ASN	40%	9.046.360.300	20%	3.210.497.525	(1) Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; (2) Ketersediaan sumber daya, baik SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarana penunjang, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan (3) Komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik dengan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders) urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	(1) Diseminasi informasi tentang Manajemen Talenta belum merata diterima oleh para pemangku kepentingan. Sehingga menyamakan persepsi dan membangun komitmen menjadi tantangan yang dihadapi oleh bidan-bidang teknis terkait pada BKPSDM; (2) Tidak meratanya kompetensi terhadap kebijakan Manajemen Talenta, baik dari aspek pengetahuan maupun keahlian/keterampilan; dan (3) Tidak diberikannya fasilitas panjar dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan	

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Implementasi Manajemen Talenta Pegawai ASN	40%	3.936.675.900	20%	659.239.806	(1) Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; (2) Ketersediaan sumber daya, baik SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarana penunjang, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan (3) Komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik dengan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders) urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	(1) Diseminasi informasi tentang Manajemen Talenta belum merata diterima oleh para pemangku kepentingan. Sehingga menyamakan persepsi dan membangun koimtmten menjadi tantangan yang dihadapi oleh bidnag-bidang teknis terkait pada BKPSDM; (2)Tidak meratanya kompetensi terhadap kebijakan Manajemen Talenta, baik dari aspek pengetahuan maupun keahlian/keterampilan	(1) Melakukan rapat internal secara rutin, minimal 3 bulan sekali, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja serta membangun komitmen stakeholders internal terhadap SAKIP SKPD; dan (2) Mengikutsertakan aparatur terkait pada berbagai pengembangan kompetensi bertemakan SAKIP
2	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKCAPIL	74.4 Nilai	7.365.132.556	73.85 Nilai	3.305.510.989	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang-bidang teknis sehingga mempercepat pengumpulan data dan penyusunan laporan	Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten khususnya pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penambahan Sumber Daya Manusia (ASN) yang kompeten
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	91.67 %	625.414.900	89.55%	179.989.645	Adanya pelatihan bimtek pelayanan prima untuk meningkatkan kualitas SDM	Terbatasnya sarana penunjang pelayanan (Komputer)	Mengusulkan penambahan sarana yang memadai
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	483.033.400	99.8%	193.564.101	1. Adanya pelatihan bimtek pelayanan prima untuk meningkatkan kualitas SDM 2. Adanya kerjasama antar stakeholder dan beberapa inovasi yang memberikan kemudahan dalam proses pengajuan layanan adminduk	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang layanan adminduk, beberapa komputer yang ada mulai bermasalah (komputer dan printer dll serta mobil operasional yang memadai)	Perlunya penambahan anggaran untuk belanja sarana dan prasarana
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase jumlah data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	1.171.373.200	30%	123.336.805	data agregat kependudukan semester II tahun 2023 dari Kemendagri tersedia tepat waktu	Terbatasnya SDM yang mampu mengolah dan menyajikan data agregat kependudukan	Penambahan SDM yang memiliki kompetensi kependudukan maupun statistika atau mengikutsertakan SDM yang ada dalam Bimtek pengolahan dan penyajian data agregat Kependudukan
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	45.174.500	80%	10.292.300	data agregat kependudukan semester II tahun 2023 dari Kemendagri serta data kependudukan dari instansi lainnya tersedia tepat waktu	terbatasnya SDM penyusun profil kependudukan yang kompeten	Penambahan SDM yang memiliki kompetensi kependudukan maupun statistika atau mengikutsertakan SDM yang ada dalam Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
3	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	74 Nilai sakip	8.984.504.967	73.6 Nilai	4.913.311.233	Dukungan Anggaran yang Memadai;	Sarana prasana penunjang ketugasan masih kurang memadai dan penguasaan terhadap penggunaan IT masih belum Optimal	Pemenuhan Sarana Prasarana Perkantoran yang memadai dan peningkatan profesionalisme penggunaan IT
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan Penanganan Trantibum	750 Kegiatan	9.389.229.620	375 Kegiatan	3.907.924.320	Standar Operasi Prosedur yang Jelas	Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi	Koordinasi dan kerjasama di bidang ketertiban dan keamanan umum serta patroli pengamanan wilayah dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan Trantibum
		Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih	80%		76%		Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM;	Kurangnya SDM yang handal;	Peningkatan Kualitas, kuantitas dan ketrampilan SDM Satpol PP
		Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	100%		50%		Koordinasi yang baik dengan Anggota satlinmas Desa/ Kelurahan;	Partisipasi anggota satlinmas desa dan leurahan dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan masih rendah	Meningkatkan partisipasi Anggota satlinmas Desa dan Kelurahan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
		Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taat Perda	70%		76%		Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait	Masih adanya pelanggaran terhadap perda dan perbup yang dilakukan oleh masyarakat;	Penguatan Penegakan Perda dan sosialisasi Perda
4	Inspektorat								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat	73 Nilai	19.511.284.368	0 Nilai	7.482.011.708	Surat Penugasan telah proses untuk 17 SKPD dari 31 SKPD	Data dukung dari SKPD masih kurang dan juga Analisa Kertas Kerja	Membangun koordinasi eksternal dan internal
		Nilai IKM Inspektorat	88 Persen		84%				menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase SKPD yang selesai TLHP	55 Persen	2.936.137.000	0 %	390.049.396			
		Persentase perangkat daerah yang memiliki kematangan mitigasi risiko yang baik	60 Persen		0 %		Surat Penugasan telah proses	Analisa Kertas Kerja menjadi Laporan tiap SKPD masih dalam proses	Membangun koordinasi internal
		Prosentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP lebih dari 80 %	60 Persen		0 %		Surat Penugasan telah proses untuk 17 SKPD dari 31 SKPD	Data dukung dari SKPD masih kurang dan juga Analisa Kertas Kerja	Membangun koordinasi eksternal dan internal

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase OPD yang diusulkan ke TPN ZI WBK/WBBM	25 Persen	2.420.213.600	0%	543.015.801			
		Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi pelaksanaan RB	85 Persen		0%				
		Nilai MCP	92 Persen		0%				
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	72 Nilai	9.712.785.542	0 Nilai	3.902.710.099	Selarasnya dokumen Perencanaan yang memudahkan pelaksanaan kinerja dilapangan	Belum beresnya penyusunan Rencana Kebutuhan BMD	Menyelesaikan kegiatan sensus BMD
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	1 Potensi	237.322.000	1 Potensi	140.202.539	Dukungan Daerah (Legislatif dan Eksekutif) terkait Perda Kemudahan Berusaha	Belum jalannya fasilitasi kemitraan pengusaha besar dengan UMKM	Membangun komunikasi dengan pihak terkait (Kadin, Asosiasi dll)
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	400 Milyar	492.902.900	489.4 Milyar	3.494.173.926	Adannya Proyek Investasi yang Siap Ditawarkan (IPRO)	Belum memiliki Link dengan Asosiasi Investor, dan belum pengalaman mengikuti event Investasi diluar Daerah	Membangun komunikasi dengan Stakeholder terkait di Daerah untuk event promosi investasi
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	413.362.000	90.25	684.811.567	Sistem perizinan yang sudah terintegrasi dan menggunakan Teknologi Informasi	1. Seringnya maintenance aplikasi perizinan yang dikelola Kementerian kominfo (SI Cantik) dan gangguan internet, ..2. Belum Semua SDM Pelayanan memiliki kompetensi dasar pelayanan	1. Menyiapkan perangkat pendukung yang memadai..2. Mengusulkan kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM	0,9	570.409.000	50%	93.548.780	Adanya dukungan pusat untuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui dana DAK	Pelaku Usaha tidak melaporkan LKPM sebagaimana mestinya	Pendampingan/asistensi kepada pelaku usaha terkait penyampaian LKPM
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Dikelola Secara Elektronik	1	212.895.000	200%	445.021.171	Sebagian besar pengelolaan data dan informasi sudah dikelola secara elektronik	Data dan informasi belum terintegrasi ke pelaporan SKPD	Menyamakan format laporan kebutuhan data dan informasi dan sambil mencoba mengintegrasikan beberapa data dan informasi yang memungkinkan

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	67 Angka	19,552,391,202	72.85	9.259.125.918,00	Ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan	Keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pelaksanaan pengadaan	Melakukan usulan tambahan sumber daya manusia ke bagian kepegawaian
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	34.55 Persen	65,016,307,750	33.28	1.947.802.971,00	Ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan	Masih tahap pelaksanaan fisik	Koordinasi antar stakholder terkait
		Persentase tebing rusak	8.79 Persen		6.3 Persen		Tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan	Cuaca yang tidak bisa di prediksi	Melakukan pekerjaan fisik lebih awal sebelum memasuki musim penghujan
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terakses air bersih layak	87.89 Persen	18,095,140,000	87.76	1.318.594.995,00	Dukungan dana alokasi khusus	Belum meratanya akses air bersih dan sanitasi bagi warga pedesaan dan perkotaan	Perlu adanya koordinasi antara dinas teknis dengan aparat kecamatan dan desa mengenai data masyarakat yang MBR yang menerima bantuan air bersih serta penambahan akses air bersih baik volume air bersih
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi layak	100 Persen	28,348,783,000	98.75	2.068.251.052,00	Dukungan dana alokasi khusus	Belum meratanya akses sanitasi bagi warga pedesaan dan perkotaan	Perlu adanya koordinasi antara dinas teknis dengan aparat kecamatan dan desa mengenai data masyarakat yang MBR yang menerima bantuan sanitasi serta penambahan sanitasi baik volume maupun lahan untuk akses sanitasi.
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan/gedung sesuai standart	93.73 Persen	172,417,586,000	92.34	21.352.762.696,00	Visi Misi Bupati Balangan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten	Masih menunggu selesainya proses perkuatan lahan	Telah disusun Master Plan dan Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe C (Tahun 2023)
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan yang ditata	28 Buah	72,512,744,105	5 Buah	1.781.138.967,00	Tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan	untuk pintu gerbang lahannya belum bebas	melakukan koordinasi dengan pihak yang berkepentingan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kerusakan jalan	36.53 Persen	251,682,511,600	39.3 Persen	3.405.305.848,00	Adanya dukungan pusat untuk peningkatan jalan kabupaten melalui dana DAK	Keterbatasan SDM untuk proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa (konstruksi)	Menambah SDM untuk proses pengadaan Barang/Jasa agar mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (konstruksi)
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi yang terampil	58 Persen	5,113,793,000	19.8 Persen	1.174.468.843,00	Tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan	Kekurangan sumber daya manusia (ASN)	Meminta penambahan ASN ke bagian kepegawaian

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	60 Persen	2,031,062,600	51 Persen	217.620.195,00	untuk menyesuaikan dengan RTRW Provinsi dan kebijakan Nasional	Belum sinkronnya muatan Substansi RTRW Kabupaten Balangan dengan RTRW Provinsi	Akan dilaksanakan sinkronisasi antara RTRW Kabupaten Balangan RTRW Provinsi
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 Persen	1,664,990,600	15 Persen	92.343.123,00	Tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan	Akses yang sulit terjangkau	Peningkatan akses
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan kumuh yang tertangani	3.3 Ha	5,383,418,500	0,00	66.625.300,00	Kerjasama antar SKPD, Kerjasama pihak pemerintah daerah dengan pihak lain dalam pencegahan kawasan permukiman kumuh, dalam hal kerjasama, pemerintah banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain, tujuannya adalah agar dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam hal ekonomi, pendidikan kesehatan dan lain lain kepada masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh	Rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya kolaborasi antar dinas pemegang wewenang dalam 7 indikator kumuh	Perlu adanya optimalisasi kolaborasi antar dinas pemegang wewenang penanganan 7 indikator kumuh dalam hal menangani kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Balangan, dan juga melibatkan pihak masyarakat
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni	4.45 Persen	23,817,058,200		190.444.600,00	Pemilihan Lokasi yang tepat untuk Rumah Layak Huni	Akses yang sulit terjangkau	Peningkatan akses

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	89 Persen	146,640,251,340	87.61	220.299.160,00	komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan baru dan rehabilitasi PSU semakin baik/ tinggi. Pertumbuhan jumlah perumahan swadaya maupun formal yang masih kecil dengan stimulan PSU diharapkan dapat lebih berkembang dan mencegah kawasan permukiman kumuh baru	Kurang nya kesadaran pengembang perumahan baik swadaya dan formal dalam alokasi ketersediaan lahan yang diserahkan kepada pemerintah untuk pembangunan PSU	Melakukan identifikasi kebutuhan secara partisipatif dengan perubahan data yang mudah dan cepat sehingga memudahkan proses pembangunan yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.20 Nilai	42.877.641.033	71.20 Nilai	17.054.057.590	Masih Tersedianya Anggaran untuk fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Pelaksanaan Belanja fisik dan modal ada yang di tunda ke perubahan penyesuaian rekening belanja yang seharusnya belanja barang dan jasa terinput ke rekening belanja yang dibagikan kemasyarakat di anggaran murni .	Akan Menyesuaikan rekening belanja sesuai ketentuannya, evaluasi anggaran kebutuhan gaji dan tunjangan ASN dan DPRD yang masih kurang anggaran, evaluasi belanja barang dan jasa yang lainnya di anggaran murni
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	84.98 Nilai	38.465.007.183	84.88 Nilai *	13.921.705.752	Masih Tersedianya Anggaran untuk fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip BPBD	72,00	8.590.531.561	25	2.837.998.562	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	keterbatasan SDM di bagian sekretariat	memaksimalkan SDM yang ada pada sekretariat

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase warga negara yang mendapat layanan perlindungan terhadap ancaman bencana	100%	11.241.668.110	90%	1.209.209.070	Ketersediaan anggaran untuk melakukan pemenuhan program penanggulangan bencana, sesuai dengan SPM, dan nilai indeks ketahanan daerah	Eksternal ; besarnya jumlah warga yg terdampak sehingga menyulitkan dalam pelayanan kebencanaan secara menyeluruh. Internal : 1. masih kurangnya asn yg terlatih dalam penanggulangan bencana 2. kurangnya peralatan yg mendukung peringatan dini bencana	1. Memaksimalkan anggota PB yang ada. 2. dilakukan penambahan alat peringatan dini bencana atau EWS pada triwulan berikutnya
	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan bencana kebakaran dan non kebakaran	100%	1.872.305.100	90%	192.036.235	Ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah dalam penanganan kebakaran dalam daerah, adanya pembinaan dan pelatihan bagi relawan damkar	masih kurang pedulinya masyarakat tentang bahaya kebakaran dan keterbatasan SDM	melakukan penambahan sosialisasi tentang bahaya kebakaran serta penanganan di skala rumah tangga
9	Sekretariat Daerah								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi kebijakan bidang pengadministrasi umum yang terlaksana	100%	416.971.735.609	10%	53.156.519.135	Komitmen antar bagian untuk pemenuhan realisasi kinerja dan tersedianya sistem informasi yang memadai	Kualitas SDM belum sepenuhnya memadai	Perlunya SDM yang handal dan adanya komitmen seluruh ASN untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	100%	113.277.199.300	10%	68.372.893.961	Komitmen bersama untuk bekerjasama dalam program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat	Kurangnya kualitas SDM, fasilitas sarana dan prasarana dan kurangnya informasi dalam data dukung	Berkoordinir dengan stake holder terkait, perlunya sosialisasi untuk menyebarkan informasi penting sehingga optimalnya data yang diperlukan, serta terciptanya produk hukum berupa PERBUP yang mengaturnya
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	100%	4.398.688.400	10%	877.402.064	Kerjasama yang baik untuk pengelolaan, pengendalian, pembangunan dan evaluasi	Belum optimalnya pengkoordinasian dengan SKPD terkait berupa evaluasi dan monitoring	Perlunya pengendalian pelaksanaan kegiatan serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring harus dilakukan setiap bulannya untuk bisa ditindaklanjuti
10	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah								

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	74.4 Nilai	34.831.447.023	283.9 Nilai	9.164.183.139			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Tersusunnya Dokumen Penganggaran Sesuai Ketentuan, Ketepatan Waktu Penyampaian APBD	85 Nilai	460.542.628.285	138.94 Nilai	127.686.961.334			
		Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	85 Nils		106.75 Nilai				
		Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	85 Nilai		105.92 Nilai				
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	2.65 Nilai	4.203.459.500	5.96 Angka	1.285.645.363			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 Persen	3.933.361.400	23.41 Persen	1.035.019.995			
		Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	100 Persen		64.49 Persen				
		Jumlah Laporan Realisasi APBD	100 Persen		33.34 Persen				
11	Dinas Kesehatan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	73 Angka/Nilai	144.383.809.346	72.1 Angka/Nilai	65.515.554.038			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil dengan risiko tinggi	20	1.127.116.500	18.39%	259.682.636			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi dengan BBLR	3	184.712.000	9.81%	93.357.770			

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase gedung fasilitas pelayanan kesehatan yang layak	100	179.079.427.403	70.07%	26.902.381.482			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Wasting	7	1.785.145.800	7.7%	419.919.209			
		Persentase desa yang mencapai ODF	70		50.32%				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks SPM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	0,33	3.917.018.500	0.3	665.742.686			
		Cakupan Desa UCL	81		59.3				
		Persentase deteksi dini dan respon penyakit potensial KLB/Wabah	100		100%				
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio SDM Kesehatan (9 Jenis Nakes Wajib di FKTP.(Dokter)	22	12.773.969.300	24.2 Dokter	6.723.436.282			
		Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi	100		100%				
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100	261.972.000	100%	33.005.800			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	60	495.527.400	0%	84.349.400		Masih ada persalinan DK dan persalinan non fasyankes	
12	Dinas Sosial								

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76.5 Nilai	13.247.998.414	0 Nilai	5.409.258.000	Komitmen antar bagian untuk pemenuhan realisasi kinerja dan tersedianya sistem informasi yang memadai	Kualitas SDM belum sepenuhnya memadai	Perlunya SDM yang handal dan adanya komitmen seluruh ASN untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Aktif	84 %	5.814.339.700	0%	3.533.629.600	Tersediannya PSKS yang ada di Kabupaten Balangan		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya	100 %	3.256.211.100	0%	168.452.321	Standar Pelayanan Minimal yang dimampu oleh urusan sosial dan respon cepat terhadap laporan masyarakat terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang membutuhkan pelayanan dasar	Belum tersedianya basis data yang akurat sebagai bahan untuk mengoptimalkan penjangkauan untuk para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi perlindungan sosialnya	71 %	15.928.131.100	0%	491.630.948	Tersediaannya anggaran dana baik dari daerah dan pusat dalam mendukung kegiatan perlindungan sosial	Masih dalam proses verifikasi data dilapangan dan sistem pertanggung jawaban keuangan yang harus non tunai dan langsung ke penerima	
		Persentase data PPKS yang valid	40 %		0%		Ketersediaan anggaran untuk dapat memfasilitasi penyediaan data	belum tersediannya sumber daya manusia yang mampu dalam mengkoordinir dalam proses penyajian data PPKS	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpulihkan kembali	100 %	1.048.842.300	0%	190.884.000	Ketersediaan anggaran untuk dapat mefasilitasi kebutuhan masyarakat yang terdampak korban bencana alam dan sosial	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam pahlawan dalam kondisi baik	100 %	143.085.000	100 %	8.550.000	Ketersediaan anggaran dan petugas dalam merawat makam yang ada	-	
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	74 Predikat	12.117.321.828	70.6 Predikat	5.093.990.130	Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mencapai 100%	Sebagian PPTK kurang mengontrol aliran kas	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	51 Persen	4.303.261.600	51 Persen	571.478.000	Untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan yang ada dibalangan	Pengelola perpustakaan masih banyak yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang pengelolaan ilmu perpustakaan yang sesuai ketentuan	

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan	100 Persen	318.049.400	25 Persen	70.000.000	Untuk Melestarikan Koleksi Nasional dan Dokumen yang bersejarah sehingga dapat dijadikan sebagai koleksi deposit pada perpustakaan	Kurangnya informasi mengenai keberadaan naskah kuno dan tidak tersedianya alat untuk melestarikan koleksi tersebut	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Revitalisasi Arsip dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	100 Persen	963.335.000	25 Persen	238.728.800	Ketersedian anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, penataan dan pengawasan kearsipan	Pengelola Arsip di masing - masing SKPD sering terjadi pergantian sehingga dalam proses jalannya pengelolaan arsip belum dilakukan secara maksimal	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	100 Persen	632.056.000	50 Persen	238.496.165	Adanya anggaran pada bidang untuk melaksanakan kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip	Belum tersedianya anggaran danArsiparis pada setiap SKPD dalam menunjang kegiatan perlindungan dan Penyelamatan arsip	Memberikan perlakuan khusus terhadap kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui penganggaran yang tersedia di setiap skpd baik dari segi SDM dan Sapras
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentasi Pelayanan Perijinan dan Penggunaan Arsip	100 Persen	4.673.000	0	0	Tersedianya SOP untuk pelayanan izin penggunaan arsip	Belum maksimalnya tingkat ketersediaan arsip karena LKD belum memiliki Depo Arsip yang sesuai dengan standar nasional kearsipan	
14	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72 Point	11.371.614.531	68.5 Point	5.847.408.526			
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 Persen	41.747.100	35%	9.227.500			
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100 Persen	27.711.700	25%	0			
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100 Persen	2.023.579.700	35%	116.724.500			
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	590.330.000	30%	44.970.000			

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	100 Persen	1.026.762.550	35%	221.695.300			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	100 Persen	7.370.766.300	30%	1.381.478.071			
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	100 Persen	46.560.000	25%	10.285.000			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	100 Persen	91.556.000	35%	37.775.000			
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	100 Persen	16.808.800	0%	0			
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 Persen	259.990.000	25%	46.210.000			
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	47.650.000	20%	16.700.000			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	99 Persen	15.632.704.900	35%	3.630.271.500			
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah								

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72 Nilai	10.135.953.179	70.95 Nilai	5.072.451.185	Anggaran yang tersedia sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun	Masih ada beberapa subkegiatan yang belum terealisasi	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselaran Muatan RKPD dengan muatan RPJMD	100 %	4.253.683.400	100%	1.118.255.600			
		Persentase Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional	100 %		100%				
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik bidang ekonomi dan infrastruktur	94.2 %	3.753.168.400	45%	1.465.004.549	Adanya kebijakan dan sistem yang menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan	1. Masih adanya kendala dalam penentuan target yang selaras antar dokumen perencanaan milik OPD 2. media yang memudahkan dalam proses perencanaan belum saling menyambung	Melakukan asistensi dan monitoring pada proses perencanaan tingkat OPD Melakukan koordinasi antar bidang agar proses perencanaan lebih efektif
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	94.2 %		40%				

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	2.680.000.000	22%	799.515.058	<ul style="list-style-type: none"> - dukungan kebijakan pimpinan, kebijakan pembangunan berbasis hasil kajian/ riset- dukungan anggaran penelitian dan pengembangan - terjalannya kolaborasi antar OPD mendukung pemberian informasi/ data sekunder dan primer, dan pemanfaatan hasil kelitbangan - dukungan sumber daya yang kompeten yakni mitra Lembaga, Yayasan dan perguruan tinggi pelaksana penelitian dan pengembangan (akademisi berpengalaman dan berkualifikasi) 	<ul style="list-style-type: none"> - belum tersedianya panduan penelitian dan pengembangan di daerah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (RIPJ-PID) - masih terbatasnya hasil perekayaasaan dan penerapan terkait pengembangan komoditas unggulan- tema dan topik kajian dan penelitin belum mewakili isu strategis dan permasalahan daerah yang mendesak memerlukan penanganan dan penyelesaian - masih terbatasnya kapasitas dan kapabilitas pejabat fungsional peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> - penajakan untuk menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (RIPJ-PID)- mengikutsertakan peneliti dan tenaga pelaksana teknis penelitian dan pengembangan pada kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat pelatihan- melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan kontinyu terhadap hasil penelitian dan pengkajian
		Nilai Inovasi SKPD	52 Nilai		0		<ul style="list-style-type: none"> - Pernyataan Komitmen semua Kepala SKPD, BLUD/UPTD Puskesmas untuk menerapkan Culture Of Innovation - Adanya inovasi Sepeda Baru (Sistem penjangkaran Inovasi daerah Balangan terpadu) melakukan sosialisasi dan penjaingan - Inovasi jemput bola ke semua SKPD/BLUD dan UPT Puskesmas) - Adanya alokasi anggaran untuk reward bagi inovasi terbaik dengan terus meningkatkan uang pembinaan dan penambahan anggaran khusus inovasi - Adanya Tim Klinik inovasi dengan membentuk Tim Pelaksana, Aktor dan Jejaring Klinik Inovasi Balangan (Klinik Inoba) serta betkolaborasi dengan Aktor Inovasi (Akademisi, Pelaku bisnis, Media massa, pemerintahan, komunitas dll) - Adanya Tim Akselerasi inovasi daerah untuk mendorong dan percepatan pemenuhan data dukung inovasi sebelum input IGA 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah inovasi terjaring masih kurang - Pengadministrasian inovasi masih perlu ditingkatkan lagi - Sarana dan prasarana inovasi masih kurang - Rendahnya budaya inovasi serta rendahnya tingkat replikasi inovasi - Belum terjaringnya inovasi dari masyarakat, sekolah, desa, DPRD, UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi metode penjangkaran inovasi secara terpadu yang didukung oleh pemangku kebijakan dan stakeholder melalui sosialisasi ke semua SKPD dan FGD konfirmasi inovasi oleh admin inovasi. - Upgrade wadah pelaporan inovasi (aplikasi sinovda) yang berfungsi untuk menghmpun inovasi dari SKPD. - Melakukan desiminasi digital melalui media online, website/aplikasi dan cetak secara intensif. - Memberikan dukungan anggaran yang cukup bagi pengembangan inovasi serta didukung sarana prasarana yang memadai. - Memfasilitasi bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi- sosialisasi terkait data dukung, penyusunan Proposal, profil bisnis dan Rancang Bangun Inovasi. - Menjaring inovasi dari masyarakat, sekolah, desa dan DPRD, UMKM
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata								

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72 Nilai	13.616.309.531	135.6 Nilai	5.284.319.102	- Anggaran yang tersedia sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun	- Masih ada beberapa posisi koordinator kegiatan yang belum terisi	- Mempercepat proses hibah tanah untuk sarpras Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan yang aktif, pemuda pelopor dan persentase wirausaha muda	30 %	1.700.568.800	25 %	443.284.125	- Sebagian posisi SDM yang kosong sudah bertambah - Adanya komitmen dari masing-masing bidang untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah disusun	- Banyak pelaksana kegiatan fisik yang belum melaporkan progres pekerjaannya ke Bidang Teknis	- Memberikan informasi kepada Pejabat Pengadaan untuk menyampaikan kepada Pemenang / pelaksana pekerjaan untuk segera melaksanakan pekerjaan fisiknya
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabor yang Berprestasi	60 %	21.827.281.400	40 %	8.135.395.456		- Akses menuju destinasi wisata yang belum terbangun, menghambat proses distribusi bahan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di destinasi wisata	- Lebih berkoordinasi dengan Dinas PU Perkim dan Dinas Pertanahan dan LH dalam proses pembebasan lahan Sport Center
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	60 %	760.004.000	60%	744.095.100		- Kegiatan Fisik di Bidang Olahraga masih terkendala proses hibah tanah nya	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang mempunyai Daya Tarik	60 %	4.472.520.800	30 %	280.567.296		Pembebasan lahan Sport Center yang masih terkendala proses Review DED dari Dinas PU Perkim	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan promosi pariwisata	10 Persen	1.529.405.500	3 %	425.951.638			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kelompok ekonomi kreatif dan Persentase Produk Kreasi Unggulan	20%	1.454.244.900,00	5 %	744.642.599			
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72 Nilai	290.214.407.366	71.6 Nilai	101.648.012.085	- Adanya respon yang cepat dari bidang – bidang berkenaan dengan pelaporan capaian beserta kelengkapan data dukung sehingga mempercepat penyusunan laporan- Adanya koordinasi yang baik dengan bidang – bidang di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	- Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia padasub bagian perencanaan dan pelaporan- Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami proses perencanaan dan pelaporan baik dalam menyusun dokumen perencanaan SKPD ataupun proses penyusunan laporan kinerja	- Penambahan SDM di sub bagian perencanaan dan pelaporan- Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan perencanaan
		Nilai IKM Perangkat Daerah	85.5 Nilai		88.63 Nilai		Dukungan sarana dan prasarana	Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat, petugas pelayanan belum pernah diberikan pelayanan khusus terkait service excelent	Mengevaluasi kembali SOP, Peningkatan kompetensi pelaksana melalui pelatihan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	75.87 Nilai	215.986.230.390	75.87 Nilai	31.767.403.899	Pendampingan peningkatan tata kelola satuan pendidikan/sekolah dan pembinaan pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk jenjang PAUD Kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini sudah meningkat karena kepercayaan orang tua terhadap pendidik/kepala sekolah atau Lembaga untuk menitipkan buah hatinya kepada lembaga PAUD, Peran Bunda PAUD dalam memberikan motivasi dan peningkatan mutu pendidikan	- Keterbatasan kuota untuk mengikuti program kompetensi Tenaga Kependidikan Tenaga PAUD - Keterbatasan bantuan peralatan belajar paud	Terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta dan melibatkan masyarakat guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan, Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
		APK SD/ sederajat	99.05 Nilai		103.91 Nilai		Pemberian dukungan Bantuan Operasional Sekolah bagi SD dan SMP Negeri dan swasta di Kabupaten Balangan Pemberian dukungan kelengkapan sarana prasarana sekolah melalui	Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah	Program Wajib Belajar 12 tahun dengan kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan Pengembangan kompetensi Lulusan, pengembangan

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
		APM SD/ sederajat	91.25 Nilai		91.74 Nilai		penyaluran DAK Fisik Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui workshop peningkatan kompetensi, forum guru mata pelajaran, dan penyelarasan kurikulum sekolah Peningkatan program beasiswa prestasi Pelaksanaan program Balangan Pintar	sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak	kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan PTK, pengembangan sarpras sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas serta Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama yang bersumber dari dana APBN untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs juga merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Balangan. Dana BOS diberikan pemerintah pusat kepada satuan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan beban orang tua peserta didik terutama bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Dana BOS tersebut digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam rangka mencapai 8 standar pendidikan nasional Peningkatan program beasiswa dan program Balangan Pintar
		APK SMP/ sederajat	82.12 Nilai		109.69 Nilai				
		APM SMP/ sederajat	66.08 Nilai		69.54 Nilai				
		Angka melanjutkan SD ke SMP	78.89 Nilai		0 Nilai		Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana Pendidikan Peningkatan program beasiswa prestasi Pelaksanaan program Balangan Pintar	Keinginan untuk cepat bekerja, kawin diusia muda, tidak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi	Memberikan pemahaman terhadap arti penting sebuah pendidikan
		Angka melanjutkan SMP ke SMA	98.75 Nilai		0 Nilai				

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
		Persentase ketersediaan kelompok belajar pada PKBM dikecamatan	100%		100 %		Ketersediaan tanah yang dihibahkan untuk pembangunan gedung dan ruang kelas PKBM	Sarana dan prasarana seperti Gedung dan RuangKelas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Belum adaMasih banyaknya masyarakat yang berfikir akan pendidikan kesetaraan hanya untuk mendapat ijazah paket C setara SMA dengan cara yang mudah sehingga masyarakat memandang sebelah mata Pendidikan kesetaraanKurang efektifnya waktu belajar peserta didik karena banyak peserta didik yang memiliki beban pekerjaan	Penyediaan Sarana Prasarana PKBMMemberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses mendapatkan ijazah paketPihak lembaga berusaha untuk memberikan honor yang pantas untuk tutorMemberikan motivasi serta semangat kepada warga belajar akan pentingnya proses pembelajaran untuk bekal di masa mendatang
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Nilai rata-rata literasi SD	68.67 Nilai		71.71 Nilai	0	Intensitas keterlibatan orang tua, intensitas sosialisasi, dan intensitas penggunaan media massa terhadap literasi baca tulis yang tinggi	Kelangkaan bahan bacaan di sekolah-sekolah, khususnya di daerah-daerah terpencil, Belum adanya ruang baca seperti perpustakaan dan pojok baca yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah, Kurangnya minat baca peserta didik	Penyediaan bahan bacaan di sekolah-sekolah, Penyediaan ruang baca dan pojok baca
		Nilai Rata-rata literasi SMP	62.01 Nilai		66.37 Nilai				
		Nilai rata-rata numerasi SD	51.75 Nilai		60.39 Nilai		Dukungan dalam segi sarana dan prasarana untuk meningkatkan pemahaman numerasi siswa	Adanya kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam mengembangkan kemampuan numerasi	Menggunakan metode pembelajaran yang menekankan pada proyek nyata sebagai sarana untuk memecahkan masalah matematika. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman numerasi, tetapi juga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, Pembelajaran Kolaboratif yang melibatkan siswa dalam kerja kelompok untuk memecahkan masalah matematika dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa
		Nilai Rata-rata Numerasi SMP	41.83 Nilai		59.61 Nilai				

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
		Indeks iklim keamanan SD	71.72 Nilai		72.68 Nilai		Adanya komunikasi dan konsistensi dalam penegakan peraturan	Iklim keamanan SD sudah baik terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba	Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan
		Indeks iklim keamanan SMP	69.95 Nilai		70.9 Nilai				
		Indeks iklim kebhinekaan SD	70.68 Nilai		71.48 Nilai		Adanya kolaborasi dan kerja sama yang baik antara Pendidik Tenaga Kependidikan dengan peserta didik	Iklim kebhinekaan SD dan SMP sudah dalam kategori baik	Satuan pendidikan terus menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme
		Indeks iklim kebhinekaan SMP	70.35 Nilai		72.43 Nilai				
		Indeks iklim inklusivitas SD	59.14 Nilai		55.35 Nilai		Adanya dukungan tindakan preventif dan intervensi di tingkat seluruh pemangku kepentingan	Iklim inklusivitas SD dan SMP sudah baik dengan terbentuknya kelompok kerja Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan	Perlu adanya pemenuhan fasilitas pendidikan untuk penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
		Indeks iklim inklusivitas SMP	56.79 Nilai		56.5 Nilai				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai Rata-Rata Literasi SD	68.67 Nilai	502.308.600	71.71 Nilai	0	Intensitas keterlibatan orang tua, intensitas sosialisasi, dan intensitas penggunaan media massa terhadap literasi baca tulis yang tinggi	Kelangkaan bahan bacaan di sekolah-sekolah, khususnya di daerah-daerah terpencil, Belum adanya ruang baca seperti perpustakaan dan pojok baca yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah, Kurangnya minat baca peserta didik	Penyediaan bahan bacaan di sekolah-sekolah, Penyediaan ruang baca dan pojok baca
		Nilai Rata-Rata Literasi SMP	62.01 Nilai		66.37 Nilai				
		Nilai Rata-Rata Numerasi SD	51.75 Nilai		60.39 Nilai		Dukungan dalam segi sarana dan prasarana untuk meningkatkan pemahaman numerasi siswa	Adanya kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam mengembangkan kemampuan numerasi	Menggunakan metode pembelajaran yang menekankan pada proyek nyata sebagai sarana untuk memecahkan masalah matematika. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman numerasi, tetapi juga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, Pembelajaran Kolaboratif yang melibatkan siswa

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			dalam kerja kelompok untuk
		Nilai Rata-Rata Numerasi SMP	41.83 Nilai		59.61 Nilai				memecahkan masalah matematika dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	60%	5.720.512.900	0%	515.039.087	Adanya Kualifikasi standar guru dan relevansi antara bidang keahlian guru dengan tugas mengajar	Kurangnya motivasi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan S1/DIV, Biaya Kuliah yang terbatas	Memberikan dan menaikkan besaran insentif tenaga pendidik non PNS pada pendidik untuk mensejahterakan para pendidik dan memotivasi bagi pendidik yang belum S1/DIV Motivasi untuk mendapatkan tunjangan profesi pendidik, ikut dalam seleksi p3k atau cpns
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Kompeten	20.41 %		20.41 %				
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	100%	258.320.000	0%	0	Adanya anggaran untuk penyediaan sarana prasarana dalam PAUD dan PNF yang menjadi salah satu syarat penerbitan izin	Akreditasi belum menjadi kebutuhan dan kesadaran bagi sebagian satuan PAUD dan PNF	Inovasi mekanisme akreditasi berbasis aplikasi yang tentunya dapat mempermudah satuan pendidikan dalam mengikuti akreditasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	48%	2.758.940.000	48 %	1.130.000.000	Adanya anggaran untuk revitalisasi, pengembangan dan pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian lokal	Adanya keterlambatan respon dari pihak Balai adat yang mendapatkan dana Hibah, hal ini dipengaruhi dari jaringan internet, pekerjaan rumah yang banyak, jarak yang jauh dari dinas.	Menyiapkan dokumen pencairan, melakukan koordinasi dengan penerima hibah
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	86.67 %	5.700.501.000	75%	2.469.625.800	Adanya anggaran untuk pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya Festival Budaya Meratus	Tidak ada kendala yang serius, hanya saja sebagai bahan evaluasi bagaimana manajemen SDM ada agar lebih efektif lagi	Melakukan rapat evaluasi internal, memetakan kesalahan dan kekurangan saat dilapangan

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	67%	3.063.085.900	0%	420.684.600	Adanya anggaran untuk pelestarian sejarah lokal	Jauhnya lokasi dan banyaknya objek yang dituju sehingga peneliti perlu banyak waktu untuk menyelesaikan kajiannya, baik waktu kelapangan, penyusunan dan analisis, serta menyesuaikan pekerjaan peneliti sendiri. Susah dalam mencari narasumber yang benar-benar mengetahui sejarah asal muasalnya suatu objek.	Melakukan koordinasi kekecamatan terkait kegiatan inventarisasi sejarah nama-nama desa, Menyiapkan peneliti dan menurunkan peneliti ke lapangan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase kegiatan pelestarian cagar budaya	80%	3.148.067.800	53.33 %	750.369.419	Adanya anggaran untuk memfasilitasi pelestarian cagar budaya	Masih ada kendala lapangan lahan dimiliki oleh beberapa orang, sehingga belum ada kesepakatan dalam pemeliharaan	Melakukan koordinasi kepada pemilik dan memberikan alat kebersihan sebagai bentuk pelestarian dan perlindungan dari pemerintah.
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		93,5 Persen	12.163.460.126	93.5%	4.627.496.543	Infrastruktur dan Fasilitas yang Memadai, Ketersediaan Anggaran yang Cukup, Evaluasi dan Monitoring yang Berkelanjutan	Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Birokrasi yang Rumit dan Berbelit	Peningkatan Kompetensi Pegawai, Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	60 Persen	10.959.441.100	60%	5.156.338.468	Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika.	Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi	Pembinaan/pendampingan /kerjasama yang baik dengan KIM
		Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarkan Informasi Publik	100 Persen		100%		Adanya kerjasama dengan media cetak dan media online	Kurangnya keaktifan pewarta kelapangan sehingga penulisan berita daerah cenderung dalam kategori persis	Kompetensi pewarta perlu ditingkatkan, keaktifan pewarta dilapangan perlu terjadual dan konsisten.

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet Diskominfo	83 Persen	1.218.135.500	27%	3.139.264.950	Misi Bupati Balangan 2021-2026 Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan dengan program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi serta kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Koneksi Internet di Desa Blank Spot	- Pengembangan Jaringan Internet masih terfokus pada Pembangunan Menara Trianggle di Desa Terpencil atau Daerah Blank Spot, untuk Trianggle ini mudah rusak dikarenakan disembar petir dan belum teranggarkan pengembangan jaringan Internet (Fiber Optik) dari Kominfo Balangan ke Kantor Kecamatan, Kantor Desa, Tempat Wisata Desa dan Tempat UKM(Pasar Desa) serta Fasilitas Umum di Seluruh Kabupaten Balangan dikarenakan anggaran terlalu besar	Melaksanakan Jasa Konsultan Pembangunan Menara Trianggle di Desa Terpencil Tahap 1
		Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	ERLINDU		26%		Menjadi Urusan Wajib Bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	- menyusun kebijakan yang terkait dengan Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sehingga mempermudah koordinasi dan komunikasi antar SKPD terkait. Membuat masterplan atau arsitektur SPBE, Peta Rencana, strategi implementasi layanan SPBE dan juga pedoman pelaksanaannya yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati, Memasukkan anggaran SPBE pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) serta menempatkan program SPBE sebagai skala prioritas, dan Melakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.	Mengumpulkan data awal Eviden untuk pemenuhan evaluasi SPBE tahun 2024 ke seluruh SKPD pemangku tiap Indikator SPBE

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang Terakses	100 Persen	394.976.400	25%	118.744.000	UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan secara bahwa, statistik merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakannya dengan alasan, data merupakan merupakan dasar bagi pembentukan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, dan pelaksana kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sebagai suatu tujuan yang paling mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut, juga juga dilatarbelakangi akan adanya kesadaran bahwa perencanaan pembangunan harus fokus pada data dan informasi yang akurat dan akuntabel sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Kondisi existing penyelenggaran data pemerintah sekarang ini masih terdapatnya keaneragaman data dan metodologi yang belum berstandar; duplikasi dan minimnya keterpaduan data pemerintah; kurangnya SDM talenta digital dan efektivitas anggaran data di instansi pemerintah; ego sektoral dalam penyelenggaraan data dan flatform data; serta keengganan berbagipakai data antar instansi pemerintah, tidak adanya metadata; data disimpan secara individu dan tersebar sehingga sulit untuk didapatkan	Para penentu kebijakan harus memastikan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan harus berdasarkan dengan data; Pihak perencana sudah harus menetapkan kebutuhan data yang wajib tersedia untuk satu tahun kedepan, serta menetapkan siklus ketersediaan data yang harus dipenuhi oleh produsen data; Mengaktifkan forum satu data kabupaten sebagai sarana penyediaan data statistik sektoral;

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
		Persentase Data Sektoral yang Valid	100 Persen		25%		<p>Terkait pengelolaan data, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,yang dasar Kebijakan tentang tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk. Hal tersebut dilatarbelakangi akan adanya kesadaran bahwa data yang valid merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan secara menyeluruh.Untuk memenuhi ketersediaan data yang valid, maka data statistik sektoral yang pada dasarnya merupakan kompilasi produk administrasi, harus dilaksanakan dengan baik mulai dari tahapan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data dengan memperhatikan dengan memperhatikan variabel, konsep, dan definisi serta teknis pengelolaan variabel data sebagai dasar pembentuk data.</p>	<p>Data sebagai hasil dari kegiatan/program yang dilaksanakan oleh SKPD belum dikelola dengan menggunakan variabel sebagaimana ditetapkan oleh kegiatan/programnya itu endiri;Variabel data belum memiliki metadata, sehingga sehingga menimbulkan pengertian atau pemahaman yang beragam terkait data yang dimiliki;Data tidak terpublikasikan segaimana seharusnya, hanya dikuasai oleh pengelola program sehingga data sulit untuk didapatkan;</p>	<p>perlu adanya penunjukan pengelola data statistik sektoral per Bidang tiap SKPD; perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan pengelola data</p>

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase gangguan yang terselesaikan	100	194.218.000	75 nilai	95.934.000	Tenaga Ahli IT yang cepat tanggap dalam hal melakukan perbaikan	Keterbatasan Sumber Daya Manusia sehingga terjadi keterlambatan dalam hal perbaikan-perbaikan keamanan informasi	Perlunya penambahan tenaga ahli dibidang IT sehingga apabila telah terjadi hal yang berhubungan dengan keamanan informasi cepat ditanggulangi
		Persentase keamanan informasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang aman	100		25%		Adanya kerjasama semua SKPD dalam mendukung terlaksananya kemanan informasi	Kurangnya sumber daya manusia di masing-masing SKPD sehingga memperlambat proses terlaksananya kemanan informasi	perlu adanya penunjukan pengelola Kemanan informasi tiap SKPD, serta perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang keamanan informasi di tiap SKPD
19	DINAS PERHUBUNGAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	78.10 Nilai	13.487.960.004	78 Nilai	8.524.684.873	Selarasnya dokumen Perencanaan yang memudahkan pelaksanaan kinerja	Rendahnya masih realisasi Keuangan	Mempercepat proses realisasi Keuangan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	100 %	1.089.892.800	36.08 %	17.752.506.002	Dukungan Anggaran dari Pemerintah Daerah untuk Pemenuhan Armada	untuk angkutan Pemda sudah realisasi tersedia 13 Armada, untuk angkutan swasta (kurangnya minat swasta untuk mengadakan usaha angkutan)	perlu adanya sinerga dari Pemerintah dan Pihak Swasta dalam menyelenggarakan angkutan
		Jumlah pelanggaran moda transportasi	12 Kejadian	5.348.279.350	10 Kejadian		Tenaga Pengatur yang memadai, Koordinasi yang jalan antar pihak Kepolisian	Kurang kesadaran penggunaan jalan, kurang pengetahuan penggunaan jalan dan kurang sarana pemantauan elektronik (CCTV / ATCS)	akan melaksanakan pelatihan bagi tenaga pengatur lalu lintas
		Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	100 %	48.041.487.400	100 %		Tenaga Pengatur yang memadai, Koordinasi yang jalan antar pihak Kepolisian	Kurang pelatihan teknis pengatur lalu lintas	akan melaksanakan pelatihan bagi tenaga pengatur lalu lintas
		Persentase moda transportasi yang laik jalan	91 %	2.622.912.200	49.09 %		adanya Peraturan baru bahwa Uji kendaraan laik jalan	Kurang kesadaran dari masyarakat tentang Kendaraan wajib Uji dan Masih ada angkutan yang ODOL	sosialisasi lebih lanjut mengenai uji kendaraan bermotor

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76,5	11.853.350.247	50 persen	4.672.606.342	(1) Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; (2) Ketersediaan sumber daya, baik SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarana penunjang, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan (3) Komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik dengan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders) urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	1). Keterbatasan SDM pada bidang Perencanaan 2). Fasilitas yang tidak memadai seperti ketersediaan Laptop	Memaksimalkan ketersediaan SDM dan Fasilitas Laptop yg ada
		Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100 Persen		50 Persen				
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	30 persen	1.328.695.100	0 persen	767.026.216	Adanya komitmen pemerintah daerah berupa perda PUG, SK Tim Pokja PUG (serta Tim teknis PUG) serta adanya anggaran	Masih rendahnya tingkat kehadiran peserta penguatan kapasitas pokja PUG	
		indeks pembangunan gender (IPG)	92.8 nilai		0 nilai				
		indeks pemberdayaan gender (IDG)	74.04 nilai		0 nilai				

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	13.8 Persen	169.021.465	0 persen	20.192.000	Adanya komitmen dan kebijakan kepala daerah berupa SK Tim terkait Perlindungan untuk Perempuan, tersedianya UPTD PPA dalam penanganan kasus	Adanya perubahan tugas jabatan dalam tim dari pusat, sehingga kabupaten menyesuaikan, kurangnya SDM dalam penanganan kasus	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan ber umur 20-24 tahun yang pernah kawin umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun	15.76 persen	315.187.700	0 persen	93.950.616	Adanya komitmen dan kebijakan kepala daerah berupa SK Tim terkait Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Tidak tersedianya update data perkawinan usia anak	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender	1 Dokumen	89.640.150	0 Dokumen	29.667.000	Adanya Komitmen dan kebijakan Kepala Daerah berupa SK terkait Tim Penyusun, pengolah dan penyaji data terpilah gender dan anak serta SK Tim SIMFONI PPA	keterlambatan dalam pengumpulan data terpilah gender dan anak dari SKPD/Instansi terkait serta keterlambatan input data di aplikasi SIMFONI PPA	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	62.73 indeks	358.175.600	0 indeks	96.547.200	Adanya Komitmen dan kebijakan Kepala Daerah berupa SK terkait Gugus Tugas kabupaten Layak Anak	Kurangnya perhatian dari instansi lain terkait penyediaan data untuk Kabupaten layak anak	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	10 persen	235.409.500	400 persen	27.965.003	sudah tersedianya UPTD PPA	kurangnya SDM dalam penanganan kasus perempuan dan anak	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 kerjasama	15.927.473.800	0 kerjasama	72.228.200	Tersedianya pagu anggaran yang cukup memadai	1. Belum terpenuhi SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas 2. Sinergitas dalam penyelenggaraan kegiatan belum optimal	1. Membangun Koordinasi yang sinergitas antar Desa atau SKPD terkait 2. Memaksimalkan SDM yang ada untuk percepatan realisasi kegiatan sesuai perencanaan

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	90 Persen	7.650.517.600	75 Persen	3.570.885.989	Tersusunnya Produk hukum di desa	1. Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang Produk hukum di desa 2. Kurangnya pengetahuan pemerintah desa tentang tata aturan pembuatan Produk hukum	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Keluarga	60.32 persen	4.075.120.800	51.7 persen	1.616.134.485	Tersedianya kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam melaksanakan Tupoksi di 157 desa serta berperan dalam pencegahan STUNTING	Adanya pergantian kader PPKBD dan Sub PPKBD setiap Desa, serta belum pernah dilaksanakan pelatihan/peningkatan kapasitas kader PPKBD	1. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam menjalankan tupoksinya di wilayah kerjanya.2. Memaksimalkan peran kader PPKBD dan Sub PPKBD serta remaja dalam pencegahan stunting3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	76.9 persen	2.752.762.000	76.9 persen	3.070.683.070	1.Tersedianya dukungan alat kontrasepsi dari pemerintah. 2. Tersedianya tenaga kesehatan yag terlatih dalam memberikan pelayanan kontrasepsi 3. Tersedianya Penyuluh KB disetiap Kecamatan	masih terdapat masyarakat yang tidak mau menggunakan kontrasepsi karena faktor budaya dan agama	Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada PUS dengan melibatkan lintas sektor seperti tokoh agama dan pemangku adat setempat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	16 Orang	267.000.000	0 Orang	126.433.700	Tersedianya Penyuluh KB disetiap Kecamatan	masyarakat balangan yang masih kurang pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya pernikahan usia remaja	sosialisasi dan edukasi kepada keluarga dengan remaja serta remaja itu sendiri tentang bahaya pernikahan usia remaja dan stunting.
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			52.402.861.798		35.315.896.258			

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	74.4 Nilai	7.438.401.958	74 Nilai	3.848.386.764	Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana penunjang kegiatan	1. Belum terpenuhi SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	1. Membangun Koordinasi yang sinergitas antar karyawan 2. Memaksimalkan SDM yang ada untuk percepatan realisasi kegiatan sesuai perencanaan 3.Melaksanakan Monev di akhir triwulan untuk menelaah capaian kinerja
		Nilai IKM Perangkat Daerah	84,7		84				
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku, Ras/Etnik dan Antar Golongan yang Tertangani	1 Laporan	5.416.932.700	1 Laporan	237.502.298	Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana penunjang kegiatan	1. Belum terpenuhi SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas 2. Sinergitas dalam penyelenggaraan kegiatan belum optimal	1. Membangun Koordinasi yang sinergitas antar karyawan 2. Memaksimalkan SDM yang ada untuk percepatan realisasi kegiatan sesuai perencanaan 3.Melaksanakan Monev di akhir triwulan untuk menelaah capaian kinerja
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang Aktif	1	33.105.137.440	100 %	30.341.702.440	Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana penunjang kegiatan	1. Belum optimalnya wawasan politik masyarakat terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah 2. Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada di OPD dalam melaksanakan kegiatan	1. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat melalui sosialisasi dan bintek pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah bagi pemilih pemula 2. Peningkatan kapasitas SDM OPD melalui bintek
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Aktif	1	718.250.600	100 %	159.556.975	Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana penunjang kegiatan	*Minimnya pengetahuan SDM Ormas terkait tatacara pendaftaran Ormas	Menyelenggarakan sosialisasi dan bintek tatacara pendaftaran ormas bagi Ormas-ormas di Kabupaten Balangan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	1 Laporan	493.599.600	1 Laporan	44.662.288	Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana penunjang kegiatan	Kurangnya informasi terkait syarat peserta Paskibraka	Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi Paskibraka di lingkungan sekolah

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang Terselesaikan	1	5.230.539.500	0 %	684.085.493	Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana penunjang kegiatan	1. Belum terpenuhi SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas 2. Belum optimalnya Sinergitas dalam penyelenggaraan kegiatan	1. Membangun Koordinasi yang sinergitas antar karyawan 2. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk percepatan realisasi kegiatan sesuai perencanaan 3.Melaksanakan Movev di akhir triwulan untuk menelaah capaian kinerja
22	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	73 BB	41.388.478.910	0 BB	15.849.909.348	Dukungan Anggaran yang Memadai;	Sarana prasana penunjang ketugasan masih kurang memadai dan penguasaan terhadap penggunaan IT masih belum Optimal	Pemenuhan Sarana Prasarana Perkantoran yang memadai dan peningkatan profesionalisme penggunaan IT
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83		97.2		Infrastruktur dan Fasilitas yang Memadai, Ketersediaan Anggaran yang Cukup, Evaluasi dan Monitoring yang Berkelanjutan	Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Birokrasi yang Rumit dan Berbelit	Peningkatan Kompetensi Pegawai, Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terpenuhi	1	2.253.260.062	0.754	197.515.679	banyak pengusul penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	koordinasi kurang optimal	penambahan anggaran dan koordinasi sinergitas antar pihak yang terlibat

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	88.03	9.063.806.156	12.92	3.413.811.329	<p>Semakin tinggi nya skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, nilai tersebut menunjukkan kualitas konsumsi pangan penduduk. Pada tahun 2023 hasil skor PPH Konsumsi menunjukkan konsumsi padi-padian dan pangan hewani sudah mencapai ideal hal tersebut didukung melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, antara lain sosialisasi konsumsi pangan Beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), kepada ibu - ibu PKK Kecamatan sekabupaten balangan serta kader pangan, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar dari tingkat SD hingga SMA melalui Kegiatan B2SA Goes to School, sehingga pola konsumsi pangan B2SA diharapkan dapat di terapkan sejak dini dimulai dari tingkat keluarga.</p>	<p>Pada Tahun 2023, skor PPH konsumsi untuk sayur dan buah masih belum mencapai angka ideal sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terus ditingkatkan.</p>	<p>Memperkuat advokasi edukasi dan sosialisasi Diversifikasi pangan untuk mencapai pola konsumsi pangan bergizi seimbang dan aman (B2SA), Melaksanakan pertemuan, sosialisasi dan pelatihan pengembangan pangan lokal</p>
		Skor PPH Ketersediaan	88.94		30.082		<p>Tercapainya skor PPH Ketersediaan karena ada beberapa kelompok bahan pangan (Padi-padian, gula, minyak dan lemak) sudah mencapai skor maksimal PPH Ketersediaan</p>	<p>Ketersediaan umbi-umbian tahun 2023 menurut skor PPH ketersediaan masih belum mencukupi karena masih didominasi oleh produksi ubi kayu</p>	<p>Perkuat koordinasi untuk peningkatan ketersediaan dan akses fisik terhadap pangan ke setiap rumah tangga dan individu dalam keluarga</p>

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	20 %	719.579.500	0.09	110.858.200	Telah dilaksanakan dan diannggarkan Bantuan Desa Rawan Pangan	Masih terdapat beberapa desa rawan pangan yang belum dapat bantuan karena keterbatasan anggaran	Menganggarkan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan berdasarkan peta kerawanan pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	90 %	78.747.200	22.5	38.290.000	Alat dan Uji Pestisida sudah tersedia	Belum adanya Petugas Pengambil Sampel PSAT yang bersertifikat	Mengikuti Pelatihan Petugas Pengambil Sampel PSAT
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	4 %	37.179.600	2.5	17.828.200	Kegiatan restocking benih ikan di perairan umum	1. Potensi lestari perikanan sehingga kegiatan penangkapan ikan tidak dapat dilakukan sebanyak-banyaknya yang mungkin dapat berakibat overfishing. 2. Sebagian besar pekerjaan utama masyarakat Kabupaten Balangan adalah petani dan menangkap ikan sebagai pekerjaan sampingan, sehingga ikan hasil penangkapan hanya dijual di sekitar lingkungan desa dan dalam jumlah yang tidak besar	Verifikasi ke lapangan untuk mendata ulang RTP perikanan tangkap (jumlah trip, jumlah produksi dan alat tangkap yang digunakan) (sedang berlangsung)
		Persentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap (%)	4 %		2.5		Kegiatan restocking benih ikan di perairan umum	1. Potensi lestari perikanan sehingga kegiatan penangkapan ikan tidak dapat dilakukan sebanyak-banyaknya yang mungkin dapat berakibat overfishing. 2. Sebagian besar pekerjaan utama masyarakat Kabupaten Balangan adalah petani dan menangkap ikan sebagai pekerjaan sampingan, sehingga ikan hasil penangkapan hanya dijual di sekitar lingkungan desa dan dalam jumlah yang tidak besar	Verifikasi ke lapangan untuk mendata ulang RTP perikanan tangkap (jumlah trip, jumlah produksi dan alat tangkap yang digunakan) (sedang berlangsung)

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	30.6 %	31.798.311.919	20.6	687.476.337	Penumbuhan kelompok perikanan, penyediaan sarana budidaya perikanan, sosialisasi budidaya ikan	Kelompok perikanan belum sepenuhnya tersuluh dan mengikuti pelatihan/pembinaan kelompok, banyaknya kelompok-kelompok baru yang masih memerlukan pelatihan pembudidayaan	Pelatihan budidaya perikanan (pelatihan pembuatan pakan, pelatihan budidaya ikan) (angkas di TW III-IV 2024)
		Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya (%)	3 %		0.5		Tersedianya sarana budidaya perikanan seperti kolam, karamba	Banyaknya kelompok yang sudah tidak berproduksi lagi	Verifikasi ke lapangan untuk mendata ulang pokdakan yang masih aktif dan berproduksi
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Kawasan Perikanan Lestari (%)	16 %	298.656.600	6%	71.726.000	Koordinasi dengan babinsa, polri/TNI untuk kegiatan pengawasan perikanan, koordinasi dengan Bidang PSDKP Prov. Kalsel untuk bantuan sarana pokmaswas, sosialisai larangan illegal fishing, pemasangan papan larangan illegal fishing	Kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindak illegal fishing, meski sudah disuluh. Pemberian sanksi tegas belum diterapkan dan masih dilakukan pembinaan	Melakukan kegiatan pengawasan perikanan dengan kerjasama bersama babinsa, polri/TNI
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rasio peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan	71	589.944.200	71%	87.352.319	Pembinaan dari Bidang Perikanan dilakukan secara berkelanjutan, poklahsar yang dibina memiliki kemauan, optimis dan inisiatif yang tinggi	-	Promosi diversifikasi produk olahan hasil perikanan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	1.05 %	65.793.749.131	3 %	29.868.692.439	Banyaknya minat petani untuk meremajakan tanaman perkebunan khususnya karet dan pengembangan kelapa sawit dan kopi	Ketersedian bibit yang kurang di kabupaten Balangan	Akan memberikan bantuan bibit dan sarana produksi perkebunan lainnya dan mencari informasi ketersediaan bibit di luar daerah
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	10 %		3.26%		Penambahan Populasi Ternak di Kabupaten Balangan	Variabel Pakan, ketersediaan air, Mortalitas Bibit dan Manajemen Pemeliharaan sangat berpengaruh terhadap penambahan populasi	Lahan Hijauan Makanan ternak dan Air harus lebih dahulu disiapkan,Pemilihan induk yang sudah dara untuk mempercepat proses Reproduksi serta peternak sudah diberikan pelatihan manajemen pemeliharaan ternak

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
		Persentase Pelayanan Inseminasi Buatan	6 %		1.83%		Peralatan Inseminasi Buatan Bibit / Semen Beku ternak unggul tersedia beserta N2 Cair	Kurangnya petugas inseminator, saat ini hanya ada 4 Inseminator aktif yang melayani 8 kecamatan dan belum tersedianya Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) di seluruh kecamatan sehingga untuk pelayanan Inseminasi Buatan memerlukan jarak tempuh yang lama pada saat membawa bibit sehingga bisa mengurangi kualitas bibit/semen beku	Penambahan Petugas Inseminator dengan mengajukan usulan pelatihan BIMTEK Inseminator dan Pembangunan ULIB di 3 kecamatan (Juai, Tebing Tinggi, Batumandi) serta Rehab 1 ULIB di Kec. Awayan
		Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan	1,05		2.73%		Semakin banyaknya saprodi yang bisa dianggarkan baik untuk tanam padi ataupun jagung sehingga bantuan saprodi utama maupun tambahan dapat lebih mendukung peningkatan produksi	Produksi pertanian yang selalu dipengaruhi oleh intensitas serangan opt yang bisa menyebabkan kehilangan jumlah produksi, seperti hama wereng, serangan tikus dan opt lainnya	- Memberikan bantuan obat dan pestisida secara tepat waktuDan memberikan pelatihan kepada petani supaya dapat melakukan pengendalian serangan sedini mungkin dan tepat sasaran- Penyediaan saprodi benih unggul supaya petani tanam benih unggul yang secara produksi lebih tinggi dari padi lokal
		Persentase Peningkatan Produktifitas Hortikultura	1,05 %		7.46%		- Membantu Masyarakat dalam budidaya hortikultura - Untuk meningkatkan produksi hortikultura - Mengurangi Inflasi	Pengadaan Sesuai Aliran Kas	Mempercepat proses pelaksanaan Distribusi Sarana untuk Budidaya Hortikultura
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	8 %	78.371.548.595	74.42 %	387.007.660	Penambahan Populasi ternak besar dan kecil	Permintaan daging yang meningkat seiring penambahan jumlah penduduk dan perbaikan ekonomi keluarga serta lambatnya peningkatan jumlah populasi ternak besar dan kecil	Penambahan Populasi ternak besar dan kecil dengan pemberian bantuan hibah dari pemerintah yang tepat sasaran, memberikan pelatihan bagaimana cara budidaya ternak yang baik dan benar
		Persentase peningkatan prasarana pertanian	20 %		4.5 %		Banyaknya minat petani untuk meremajakan tanaman perkebunan khususnya karet dan pengembangan kelapa sawit dan kopi	Ketersediaan bibit yang kurang di kabupaten Balangan	Akan memberikan bantuan bibit dan sarana produksi perkebunan lainnya dan mencari informasi ketersediaan bibit di luar daerah

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	1.143.684.300	50%	339.017.405	Tersedianya obat-obatan dan vaksin hewan untuk pengobatan maupun vaksinasi	Untuk kasus penyakit tertentu tidak bisa dilakukan tindakan karena keterbatasan sarana selain itu kurangnya petugas Dokter hewan dan petugas paramedik Veteriner yang dapat melayani 8 Kecamatan	Melengkapi Sarana dan Prasarana penunjang untuk penanganan Penyakit hewan tertentu dan juga penambahan Petugas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas wilayah yang terdampak bencana Perkebunan yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan	100 %	12.930.011.050	0	2.678.347.426	Pada Tw II, capaian kinerja sebesar 64 % (perhitungan thd realss OPT, DPI dan Karlabun), dimana realisasi pengadaan dan penyaluran Saprodi GDK berupa pupuk NPK dan Urea dengan nilai +/- 8 Milyard merupakan pendorong capaian terhadap kinerja program cukup besar. Realisasi pengadaan ini sekaligus merupakan upaya pengendalian OPT	Faktor penghambat yang muncul tidak terlalu signifikan, rencana kegiatan dapat dijalankan	Pelaksanaan Rencana kegiatan sesuai jadwal kegiatan dan berdasarkan RAK (Rencana Anggaran Kegiatan). Terhadap potensi bencana karlabun, dilakukan konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD terkait (BPBD) tentang jadwal musim panas, meningkatkan kesiagaan bencana sesuai TUSI melalui Brigade, KTPA dan pembentukan KTPA baru
		Persentase Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 %		100%		<p>- petani sudah mulai mengenal pengendalian harus ramah lingkungan, penggunaan pestisida sesuai rekomendasi dan penggunaan pestisida nabati dengan menggunakan tanaman yang bisa dijadikan pestisida</p> <p>- selalu ada informasi perubahan cuaca (prakiraan hujan dan kemarau) dari informasi BPS ataupun secara online sehingga petani dapat menentukan waktu awal tanam dan kapan panen yg didukung oleh cuaca</p>	<p>- masih kurang tahunya petani membuat atau mngolah pestisida nabati sendiri</p> <p>- perubahan cuaca atau iklim yg tidak menentu sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman yg bisa disebabkan oleh opt</p>	<p>- mengadakan pelatihan pembuatan pestisida nabati</p> <p>- melaksanakan sekolah lapang iklim dg intensitas yg lebih banyak lagi.</p>

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	4.2%	12.545.871.600	2.7	4.504.096.700	- kelompok tani berfungsi dengan baik maka petani dapat meningkatkan usaha taninya.	belum berjalan secara maksimal karena pengurus dan anggota belum mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai mestinya	Peningkatan Pembinaan Kelompok melalui program pemberdayaan
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Aluntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	72 Nilai	8.029.293.690	0 Nilai	4.258.664.697	Dukungan Anggaran yang Memadai	Sarana Prasarana penunjang ketugasan masih kurang memadai, kurangnya SDM yang kompeten yang mendukung ketugasan dan Penguasaan terhadap penggunaan IT masih belum optimal	Pemenuhan Sarana dan Prasarana perkantoran yang memadai dan peningkatan profesionalisme penggunaan IT
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rasio K+C288:C295 kebutuhan Tenaga Kerja terhadap Persediaan Tenaga Kerja	25 persen	32.718.000	0 persen	11.749.400	Adanya dukungan anggaran yang memadai	Masih banyaknya perusahaan yang belum menyusun rencana tenaga kerja sehingga kebutuhan tenaga kerja sulit terhimpun selain itu masih belum adanya kesadaran perusahaan untuk lapor lowongan pekerjaan	melakukan pendampingan kepada perusahaan untuk menyusun RTK, dan menghimbau kepada perusahaan untuk melaporkan lowongan pekerjaan
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	60 persen	26.507.226.328		24.221.342.582	Adanya dukungan anggaran pemerintah untuk pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja	Terbatasnya perusahaan untuk penempatan kerja	Mejalin kerja sama dengan pihak ketiga atau perusahaan untuk penempatan kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Kebutuhan Kerja yang Terpenuhi	60 persen	838.649.200	6.71 persen	146.230.098	Adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan pelayanan antar kerja	kualitas SDM pencari kerja yang masih rendah dan sedikitnya lowongan kerja yang tersedia di daerah	meningkatkan kualitas SDM pencari kerja dengan dibekali pelatihan-pelatihan
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	90 persen	6.818.754.900	66.82 persen	3.722.565.454	Adanya dukungan anggaran pemerintah untuk pelaksanaan Premi BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Rentan	Validitas Data Tenaga Kerja Khususnya Tenaga Kerja Rentan Di Kabupaten Balangan	Menjalin Kerjasama dengan instansi terkait dan berkolaborasi dengan memperbanyak kegiatan/event sehingga menghasilkan validitas data yang maksimal

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	30 persen	112.099.300	11.11 persen	33.097.000	1. Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan koperasi 2. Program pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan bagi pengurus dan pengawasan koperasi.	1. Kurangnya partisipasi aktif dari anggota koperasi dalam kegiatan koperasi. 2. Rendahnya regenerasi kepengurusan koperasi. 3. Sebagai Bidang baru, masih kurangnya dukungan anggaran, sarana dan prasarana dan SDM di Bidang Koperasi	1. Meningkatkan pembinaan, pendampingan dan pengawasan koperasi bagi koperasi aktif. 2. Melakukan inventarisasi permasalahan/pemetaan untuk mendapatkan data koperasi secara menyeluruh.
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dengan SDM yang kompeten	50 persen	46.330.000	0 persen	4.498.200	1. Adanya kebijakan dan program pemerintah yang fokus pada peningkatan kualitas SDM koperasi. 2. Kemudahan akses informasi dan teknologi yang mendukung pengembangan kompetensi SDM Koperasi.	1. Kurangnya kesadaran dan komitmen dari pengurus dan anggota koperasi untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi. 2. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan. 3. Untuk tahun ini Diklat Perkoperasian akan dilaksanakan pada Triwulan 4	1. Melakukan identifikasi kebutuhan diklat perkoperasian bagi koperasi aktif.
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi usaha	4 persen	1.018.510.000	0 persen	314.631.950	* Terbukanya ritel modern melakukan kemitraan dengan UMKM serta regulasi nasional yang membuka kesempatan bagi UMKM untuk bermitra dengan ritel modern, * Tersedianya berbagai akses permodalan yang disediakan baik dari pihak perbankan maupun kerjasama pemerintah, apalagi sudah ada Program Kredit tanpa bunga dan biaya administrasi seperti program KUR BABUNGAS dan BAKABUN	* Produk UMKM yang masih belum memenuhi standar kriteria yang disyaratkan sebagai mitra ritel modern, * Enggannya masyarakat untuk mengakses fasilitas permodalan dari pihak ketiga serta kurang siapnya pelaku UMKM dalam mengakses permodalan (dari segi agunan, kesiapan perencanaan usaha dan beban biaya tambahan)	* Pembinaan kepada UMKM untuk menstandarkan produk untuk dapat diterima di ritel modern (baik dari segi kelengkapan perizinan, kualitas produk maupun penyajian/ kemasan produk), * Terus melakukan sosialisasi akses permodalan kepada UMKM serta memberikan bantuan modal berupa aset peralatan penunjang usaha UMKM melalui fasilitas bantuan peralatan dari pemerintah untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang skala usahanya bertambah	0.56 persen	1.745.930.000	0 persen	794.168.500	Tersedianya anggaran serta tingginya minat pelaku UMKM untuk dapat menambah skala usahanya	Terbatasnya jumlah UMKM yang dapat difasilitasi dalam menambah skala usahanya	Memberikan fasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan SDM pelaku UMKM sehingga dapat menambah skala usahanya
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pesentase warga transmigrasi yang terampil	16 persen	185.272.400	0 persen	39.846.000	Tersedianya anggaran dan Sikap warga yang memiliki kemauan yang cukup tinggi untuk meningkatkan perekonomian mereka	Masih kurangnya tingkat pengetahuan warga untuk mengatasi kondisi lahan yang kurang baik dan keterampilan dalam pengolahan hasil	Pelatihan dan pembinaan kelompok tani dan UMKM bekerja sama dengan stakholder lain
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase lahan usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	19.5 persen	128.999.700	0 persen	3.600.000	Tersedianya lahan untuk peningkatan pendapatan diberbagai sektor percepatan pengembangan kawasan Transmigrasi	Kondisi lahan yang masih sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca terutama hujan sehingga sangat berpengaruh pada aktivitas pertanian (bercocok tanam) karena tingginya kandungan air dan tebalnya lumpur	Dilaksanakan budidaya tanaman tanpa media tanam di lahan langsung yaitu pembangunan rumah jamur di lokasi sekaligus pelatihan budidayanya , disamping itu adanya sharing dengan SKPD teknis terkait penggunaan lahan untuk peternakan domba dan kolam ikan menggunakan media terpal
24	Kecamatan Lampihong								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai	5.358.435.323	71 Nilai	3.001.128.234	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	Adanya Proses Pembelian Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Katalog dan Siopen yang belum dikuasai PPTK Kegiatan	Melakukan pelatihan dan sosialisasi penggunaan Aplikasi E-Katalog dan Si Open untuk Pegawai
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	111.374.400	0 Laporan	15.646.000	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	Adanya Proses Pembelian Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Katalog dan Siopen yang belum dikuasai PPTK Kegiatan	Melakukan pelatihan dan sosialisasi penggunaan Aplikasi E-Katalog dan Si Open untuk Pegawai
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	245.986.800	0 Laporan	111.956.460	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	terlambatnya masing-masing PPTK menyerahkan dan melengkapi SPJ untuk di Realisasikan sehingga terjadinya Progres GU juga mengalami kendala dan ini akan berdampak pada Kegiatan lain yang telah di rencanakan pada Rencana Anggaran Kas atau aliran kebutuhan Anggaran tiap bulan	memberikan masukan kepada masing-masing pelaksana kegiatan untuk menjadi perhatian terkait pelaksanaan anggaran agar memperhatikan rencana anggaran kas masing-masing pelaksana kegiatan dan sesegeranya menyelesaikan spj dan disampaikan kepada bendahara agar proses masuk ketahap pembayaran

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	43.134.800	0 Laporan	27.484.000	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	terlambatnya masing-masing PPTK menyerahkan dan melengkapi SPJ untuk di Realisasikan sehingga terjadinya Progres GU juga mengalami kendala dan ini akan berdampak pada Kegiatan lain yang telah di rencanakan pada Rencana Anggaran Kas atau aliran kebutuhan Anggaran tiap bulan	memberikan masukan kepada masing-masing pelaksana kegiatan untuk menjadi perhatian terkait pelaksanaan anggaran agar memperhatikan rencana anggaran kas masing-masing pelaksana kegiatan dan sesegeranya menyelesaikan spj dan disampaikan kepada bendahara agar proses masuk ketahap pembayaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	192.236.500	0 Laporan	37.754.000	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	terlambatnya masing-masing PPTK menyerahkan dan melengkapi SPJ untuk di Realisasikan sehingga terjadinya Progres GU juga mengalami kendala dan ini akan berdampak pada Kegiatan lain yang telah di rencanakan pada Rencana Anggaran Kas atau aliran kebutuhan Anggaran tiap bulan	memberikan masukan kepada masing-masing pelaksana kegiatan untuk menjadi perhatian terkait pelaksanaan anggaran agar memperhatikan rencana anggaran kas masing-masing pelaksana kegiatan dan sesegeranya menyelesaikan spj dan disampaikan kepada bendahara agar proses masuk ketahap pembayaran
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	140.137.000	0 Laporan	76.919.000	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	terlambatnya masing-masing PPTK menyerahkan dan melengkapi SPJ untuk di Realisasikan sehingga terjadinya Progres GU juga mengalami kendala dan ini akan berdampak pada Kegiatan lain yang telah di rencanakan pada Rencana Anggaran Kas atau aliran kebutuhan Anggaran tiap bulan	memberikan masukan kepada masing-masing pelaksana kegiatan untuk menjadi perhatian terkait pelaksanaan anggaran agar memperhatikan rencana anggaran kas masing-masing pelaksana kegiatan dan sesegeranya menyelesaikan spj dan disampaikan kepada bendahara agar proses masuk ketahap pembayaran
25	Kecamatan Auyan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.4 Nilai	4.484.978.357	67.2 Nilai	2.354.003.913	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar	Terdapat beberapa penyedia barang dan jasa yang belum terdaftar pada aplikasi si Open ataupun E-Katalog	Perlu adanya pembelajaran lebih lanjut tentang aplikasi yang digunakan dalam hal pengadaan barang jasa, agar pencapaian kinerja dan untuk mempercepat realisasi anggaran bisa berjalan maksimal

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Laporan	124.965.000	1 Laporan	56.680.000	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar	Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat realisasi capaian kinerja	Memberikan pemahaman kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja dan Dampaknya terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	159.484.000	1 Laporan	59.980.000	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar	Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat realisasi capaian kinerja	Kedepan akan lebih menyesuaikan lagi dalam hal perencanaan dalam penganggaran khususnya dalam penyusunan anggaran kas
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	78.916.500	1 Laporan	28.370.000	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar	Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat realisasi capaian kinerja	Kedepan akan lebih menyesuaikan lagi dalam hal perencanaan dalam penganggaran khususnya dalam penyusunan anggaran kas
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	354.143.300	1 Laporan	104.755.000	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar	Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat realisasi capaian kinerja	Kedepan akan lebih menyesuaikan lagi dalam hal perencanaan dalam penganggaran khususnya dalam penyusunan anggaran kas
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	146.982.100	1 Laporan	99.248.500	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar	Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat realisasi capaian kinerja	Kedepan akan lebih menyesuaikan lagi dalam hal perencanaan dalam penganggaran khususnya dalam penyusunan anggaran kas
26	Kecamatan Paringin								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 nilai	7.917.335.674	71 nilai	4.156.403.570	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar	Kurangnya pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pembelanjaan dengan aplikasi yang di tetapkan, misalnya pada aplikasi belanja SI OPEN	Perlu adanya sosialisasi, bimbingan dan pembelajaran lebih lanjut tentang aplikasi aplikasi yang digunakan agar pencapaian kinerja dan percepatan realisasi pagu anggaran bisa berjalan maksimal

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Laporan	402.102.340	0 Laporan	182.446.100	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar	Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat realisasi capaian kinerja	Perlu adanya sosialisasi, bimbingan dan pembelajaran lebih lanjut tentang aplikasi aplikasi yang digunakan agar pencapaian kinerja dan percepatan realisasi pagu anggaran bisa berjalan maksimal
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	3.305.711.800	0 Laporan	372.937.260	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar	Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat realisasi capaian kinerja	Perlu adanya sosialisasi, bimbingan dan pembelajaran lebih lanjut tentang aplikasi aplikasi yang digunakan agar pencapaian kinerja dan percepatan realisasi pagu anggaran bisa berjalan maksimal
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	279.477.100	0 Laporan	186.189.500	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar	Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat realisasi capaian kinerja	Perlu adanya sosialisasi, bimbingan dan pembelajaran lebih lanjut tentang aplikasi aplikasi yang digunakan agar pencapaian kinerja dan percepatan realisasi pagu anggaran bisa berjalan maksimal
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	185.959.000	0 Laporan	45.980.000	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar	Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat realisasi capaian kinerja	Perlu adanya sosialisasi, bimbingan dan pembelajaran lebih lanjut tentang aplikasi aplikasi yang digunakan agar pencapaian kinerja dan percepatan realisasi pagu anggaran bisa berjalan maksimal
27	Kecamatan Batumandi								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.2 Nilai	5.574.463.588	0 Nilai	2.953.994.155	Sudah adanya penyesuaian pagu anggaran sehingga kinerja dalam setiap sub kegiatan bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan	Kurangnya pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pembelanjaan dengan aplikasi yang di tetapkan, misalnya pada aplikasi belanja SI OPEN	Perlu adanya sosialisasi, bimbingan dan pembelajaran lebih lanjut tentang aplikasi aplikasi yang digunakan agar pencapaian kinerja dan percepatan realisasi pagu anggaran bisa berjalan maksimal
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Laporan	57.937.900	1 Laporan	24.735.700	Sudah adanya penyesuaian pagu anggaran sehingga kinerja dalam setiap sub kegiatan bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan	Kurangnya pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pembelanjaan dengan aplikasi yang di tetapkan, misalnya pada aplikasi belanja SI OPEN ataupun EKATALOG	Perlu adanya sosialisasi, bimbingan dan pembelajaran lebih lanjut tentang aplikasi aplikasi yang digunakan agar pencapaian kinerja dan percepatan realisasi pagu anggaran bisa berjalan maksimal

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	150.911.000	1 Laporan	49.899.500	Sudah adanya penyesuaian pagu anggaran sehingga kinerja dalam setiap sub kegiatan bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan	Kurangnya pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pembelanjaan dengan aplikasi yang di tetapkan, misalnya pada aplikasi belanja SI OPEN ataupun EKATALOG	Perlu adanya sosialisasi, bimbingan dan pembelajaran lebih lanjut tentang aplikasi aplikasi yang digunakan agar pencapaian kinerja dan percepatan realisasi pagu anggaran bisa berjalan maksimal
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	23.350.000	0 Laporan	4.695.000	Sudah adanya penyesuaian pagu anggaran sehingga kinerja dalam setiap sub kegiatan bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan	Kurangnya pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pembelanjaan dengan aplikasi yang di tetapkan, misalnya pada aplikasi belanja SI OPEN ataupun EKATALOG	Perlu adanya sosialisasi, bimbingan dan pembelajaran lebih lanjut tentang aplikasi aplikasi yang digunakan agar pencapaian kinerja dan percepatan realisasi pagu anggaran bisa berjalan maksimal
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	392.696.100	1 Laporan	37.455.600	Sudah adanya penyesuaian pagu anggaran sehingga kinerja dalam setiap sub kegiatan bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan	Kurangnya pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pembelanjaan dengan aplikasi yang di tetapkan, misalnya pada aplikasi belanja SI OPEN ataupun EKATALOG	Perlu adanya sosialisasi, bimbingan dan pembelajaran lebih lanjut tentang aplikasi aplikasi yang digunakan agar pencapaian kinerja dan percepatan realisasi pagu anggaran bisa berjalan maksimal
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	132.320.900	0 Laporan	47.220.900	Sudah adanya penyesuaian pagu anggaran sehingga kinerja dalam setiap sub kegiatan bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan	Kurangnya pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pembelanjaan dengan aplikasi yang di tetapkan, misalnya pada aplikasi belanja SI OPEN ataupun EKATALOG	Perlu adanya sosialisasi, bimbingan dan pembelajaran lebih lanjut tentang aplikasi aplikasi yang digunakan agar pencapaian kinerja dan percepatan realisasi pagu anggaran bisa berjalan maksimal
28	Kecamatan Tebing Tinggi								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.4 Nilai	3.715.793.347	66.75 Nilai	1.929.247.696	Terlaksananya Kegiatan Sesuai Rencana Anggaran Kas, dan pelaksana kegiatan cepat menyerahkan dan melengkapi spj untuk dibayarkan	terlambatnya masing-masing PPTK menyerahkan dan melengkapi SPJ untuk di Realisasikan sehingga terjadinya Progres GU juga mengalami kendala dan ini akan berdampak pada Kegiatan lain yang telah di rencanakan pada Rencana Anggaran Kas atau aliran kebutuhan Anggaran tiap bulan	memberikan masukan kepada masing-masing pelaksana kegiatan untuk menjadi perhatian terkait pelaksanaan anggaran agar memperhatikan rencana anggaran kas masing-masing pelaksana kegiatan dan sesegaranya menyelesaikan spj dan disampaikan kepada bendahara agar proses masuk ketahap pembayaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Laporan	65.979.000	0 Laporan	29.400.000	adanga dukungan anggaran untuk tenga administrasi pelayanan	minimnya tenga administrasi pelayanan terhadap pembuatan SPJ dan peggunaan si open	sekretariat kecamatan mensosialisasikan pembuatan spj dan penggunaan si open guna kelancaran tugas

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	383.382.300	0 Laporan	110.265.000	terlaksananya kegiatan safari ramadhan	terlambatnya koordinasi terkait tempat pelaksanaan yang di jadikan tempat kegiatan safari ramdhan	melakukan rapat dengan semua kepala desa terkait kesediaan tempat untuk pelaksanaan tempat kegiatan safari ramdhan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	72.810.000	0 Laporan	26.179.100	adanya dukungan anggaran terhadap tenaga administrasi ketentraman dan ketertiban umum	keterlambatan pembayaran honrarium tenga administrasi di karenakan spj kegiatan musrenbang terlambat di seturkan kebendahara sehingga proses GU mengalami keterlambatan	melakukan percepatan pembuatan SPJ agar sesuai aliran kas yang sudah di rencanakan dan dilaksanakan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	243.147.200	0 Laporan	69.400.200	adanya dukungan anggaran terhadap tenaga administrasi pemerintahan	keterlambatan pembayaran honrarium tenga administrasi di karenakan spj kegiatan musrenbang terlambat di seturkan kebendahara sehingga proses GU mengalami keterlambatan	melakukan percepatan pembuatan SPJ agar sesuai aliran kas yang sudah di rencanakan dan dilaksanakan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	327.993.300	0 Laporan	75.049.100	terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	minimnya pemahaman terhadap penggunaan si open sehingga mengalami keterlambatan dalam pembuatan spj	sekretariat kecamatan mensosialisasikan pembuatan spj dan penggunaan si open guna kelancaran tugas
29	Kecamatan Halong								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.4 Nilai	4.421.066.301	70.15 Nilai	2.342.407.358	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	1. Masih Kurangnya Pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap Target Kinerja yang harus dicapai 2. Tidak adanya sanksi terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang tidak mencapai Target Kinerja yang sudah Ditetapkan	Memberikan Pemahaman kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	575.771.300	0 Laporan	186.471.000	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	1. Masih Kurangnya Pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap Target Kinerja yang harus dicapai 2. Tidak adanya sanksi terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang tidak mencapai Target Kinerja yang sudah Ditetapkan 3. Laporan Program disampaikan pada Akhir Tahun	Memberikan Pemahaman kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja dan Dampaknya terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	249.728.200	0 Laporan	94.683.200	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	1. Masih Kurangnya Pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap Target Kinerja yang harus dicapai 2. Tidak adanya sanksi terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang tidak mencapai Target Kinerja yang sudah Ditetapkan 3. Kegiatan Puncak dilaksanakan pada Bulan Juli, dan Agustus 4. Laporan Program disampaikan pada Akhir Tahun	Memberikan Pemahaman kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja dan Dampaknya terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	67.910.000	0 Laporan	29.160.000	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	1. Masih Kurangnya Pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap Target Kinerja yang harus dicapai 2. Tidak adanya sanksi terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang tidak mencapai Target Kinerja yang sudah Ditetapkan 3. Laporan Program disampaikan pada Akhir Tahun	Memberikan Pemahaman kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja dan Dampaknya terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	36.670.000	0 Laporan	17.940.000	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	1. Masih Kurangnya Pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap Target Kinerja yang harus dicapai 2. Tidak adanya sanksi terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang tidak mencapai Target Kinerja yang sudah Ditetapkan 3. Laporan Program disampaikan pada Akhir Tahun	Memberikan Pemahaman kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja dan Dampaknya terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	422.719.600	0 Laporan	150.385.000	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	1. Masih Kurangnya Pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap Target Kinerja yang harus dicapai 2. Tidak adanya sanksi terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang tidak mencapai Target Kinerja yang sudah Ditetapkan 3. Laporan Program disampaikan pada Akhir Tahun	Memberikan Pemahaman kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja dan Dampaknya terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
30	Kecamatan Paringin Selatan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.44 Nilai	6.888.033.419	71.42 Nilai	3.051.556.412	Terakomodirnya Pagu Anggaran Rencana Anggaran Kas sehingga tercapai sesuai target	Ada beberapa pihak penyedia yang belum terdaftar pada aplikasi si OPEN ataupun EKATALOG	1). Memberikan Pemahaman kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja., 2). Memberikan Pemahaman kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Laporan	248.913.300	0 Laporan	108.820.000	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	Ada beberapa pihak penyedia yang belum terdaftar pada aplikasi si OPEN ataupun EKATALOG	Memberikan Pemahaman kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja.,

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	1.991.583.200	0 Laporan	380.248.730	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	Kegiatan yang ada pada Kelurahan tidak maksimal karena masih tahap proses pelaksanaan kegiatan	Memberikan Pemahaman kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	104.356.000	0 Laporan	52.812.000	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	Masih Kurangnya Pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap Target Kinerja yang harus dicapai	Memberikan Pemahaman kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja dan Dampaknya terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	7.620.000	1 Laporan	7.534.000	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	Masih Kurangnya Pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap Target Kinerja yang harus dicapai	Memberikan Pemahaman kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang Target Kinerja dan Dampaknya terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	241.503.600	0 Laporan	106.263.600	Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan	Kegiatan Meeting Paket Musrenbang Kecamatan akan digeser di perubahan untuk kegiatan lain	Meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penatausahaan keuangan
31	Kecamatan Juai								

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Juai	67.5 Nilai	4.708.250.780	72.7 Nilai	2.146.033.064	Kemampuan SDM	Beberapa proses pengadaan barang melalui aplikasi e katalog mengalami hambatan karena kekurangsiapan penyedia yang ditunjuk, pejabat pengadaan yang terlambat ditunjuk, dan kekurangsiapan SDM di Kecamatan Juai yang mampu melaksanakan proses belanja secara e catalog (2) anggaran kas yang disusun tidak dapat memenuhi belanja barang dan jasa atas kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga harus menunggu anggaran kas triwulan berikutnya atau anggaran perubahan tahun 2024 (3) kurangnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penatausahaan keuangan	(1) Meningkatkan koordinasi baik internal maupun dengan instansi terkait di luar SKPD dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan di Kecamatan Juai (2) Meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penatausahaan keuangan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Laporan	255.998.100	0 Laporan	106.926.200	Kemampuan SDM	Proses pengadaan barang berupa televisi LCD melalui si open terhambat karena kurang siapnya penyedia dan kurangnya SDM yang menangani realisasi belanja modal (2) anggaran kas yang disusun tidak dapat memenuhi belanja barang dan jasa atas kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga harus menunggu anggaran kas triwulan berikutnya atau anggaran perubahan tahun 2024	(1) Meningkatkan koordinasi baik internal maupun dengan instansi terkait di luar SKPD dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan di Kecamatan Juai (2) Meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penatausahaan keuangan

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah laporan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 Laporan	191.594.900	0 Laporan	78.277.800	Kemampuan SDM	Proses pengadaan barang berupa pengadaan meja lipat dan beberapa spj barang dan jasa lainnya (khususnya di kegiatan PKK) melalui si open terhambat karena kurang siapnya penyedia dan kurangnya SDM yang menangani realisasi belanja secara online (2) anggaran kas yang disusun tidak dapat memenuhi belanja barang dan jasa atas kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga harus menunggu anggaran kas triwulan berikutnya atau anggaran perubahan tahun 2024 (3) kurangnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penatausahaan keuangan	(1) Meningkatkan koordinasi baik internal maupun dengan instansi terkait di luar SKPD dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan di Kecamatan Juai (2) Meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penatausahaan keuangan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	125.284.600	0 Laporan	41.964.400	Kemampuan SDM	Proses realisasi belanja barang dan jasa melalui si open terhambat karena kurangnya SDM yang menangani realisasi belanja secara online di bidang trantib (2) kurangnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penatausahaan keuangan	(1) Meningkatkan koordinasi baik internal maupun dengan instansi terkait di luar SKPD dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan di Kecamatan Juai (2) Meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penatausahaan keuangan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 Laporan	132.636.600	0 Laporan	40.560.000	Kemampuan SDM	Proses realisasi belanja barang dan jasa melalui si open terhambat karena kurangnya SDM yang menangani realisasi belanja secara online di bidang trantib (2) kurangnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penatausahaan keuangan	(1) Meningkatkan koordinasi baik internal maupun dengan instansi terkait di luar SKPD dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan di Kecamatan Juai (2) Meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penatausahaan keuangan

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 Laporan	258.044.000	0 Laporan	86.315.000	Kemampuan SDM	Proses pengadaan barang berupa pengadaan sepeda motor dan beberapa spj barang dan jasa lainnya di bidang pemerintahan melalui si open terhambat karena kurang siapnya penyedia dan kurangnya SDM yang menangani realisasi belanja secara online (2) kurangnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penatausahaan keuangan bidang pemerintahan (3) kekurangan dana yang tersedia untuk akomodir kegiatan yang dilakukan oleh bidang pembangunan	(1) Meningkatkan koordinasi baik internal maupun dengan instansi terkait di luar SKPD dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan di Kecamatan Juai (2) Meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penatausahaan keuangan (3) Mengusulkan penambahan anggaran di rancangan anggaran perubahan tahun 2024
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	78.2 %	5,822,016,400	223.2 Persen	4.772.858.329	(1) Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap urusan perindustrian dan perdagangan; (2) Ketersediaan anggaran, maupun sarana dan prasarana penunjang, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada urusan perindustrian dan perdagangan; dan (3) Komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik dengan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders) urusan urusan perindustrian dan perdagangan	Tidak meratanya pengetahuan serta rendahnya kesadaran aparatur terhadap implementasi SAKIP SKPD	
		PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100 %		300 Persen				
		NILAI SKM PERANGKAT DAERAH	88.30 Nilai SKM		265.11 Persen				

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN	15.15 %	116,750,000	50.4 Persen	17.398.200		Kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai fungsi legalitas perizinan dalam menunjang pengembangan usaha dan masih banyaknya pelaku usaha yang kurang informasi/mengeluhan mengenai kewajiban perpajakan terkait legalitas perizinan berusaha	Perlunya dilakukan sosialisasi manfaat legalitas perizinan berusaha bagi pengembangan usaha serta sosialisasi kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha yang belum/sudah memiliki legalitas perizinan berusaha
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	- %		0 Persen				
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR	10 %	13,654,872,700	0 Persen	799.574.746	1. Desain pasar sesuai standar kelayakan 2. Pengelola dan pedagang pasar yang memahami dan meneralkan standar kelayakan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala 4. Penggunaan teknologi terbaru dalam manajemen pasar 5. Dukungan anggaran dari pemerintah ataupun swasta	1. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan pasar sesuai standar kelayakan 2. Kurangnya pemahaman dari para pelaku pasar, pemda dan masyarakat ttg pentingnya pasar sesuai standar kelayakan 3. Adanya resistensi dari para pedagang yg sdh nyaman dg pasar yg ada 4. Keterbatasan anggaran	1. Kajian untuk merancang strategi dalam pemenuhan pasar sesuai standar kelayakan 2. Penyediaan insfrastruktur dasar spt listrik, air dan sanitasi yang memadai 3. Renov fasilitas pasar sesuai standar kelayakan 4. Membentuk tim kerja yg bertugas mengawasi penerapan pasar sesuai standar kelayakan 5. Sosialisasi manfaat penerapan pasar sesuai standar kelayakan 6. Monev secara berkala 7. Dukungan teknologi untuk mendukung penerapan pasar sesuai standar kelayakan

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	7.4 %	757,219,200	22.53 Persen	188.466.520	<p>1. Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Bulog, PT Wings, PT Indofood sehingga terlaksana kegiatan Pasar Murah dengan lancar.</p> <p>2. Adanya Permohonan dari Kepala Desa agar dilaksanakan Pasar Murah di Desa nya.</p> <p>3. Permintaan dari institusi, misalnya Polres Balangan</p> <p>4. Kerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan</p> <p>5. Adanya staf/ honor yang aktif dilapangan baik saat Pasar Murah maupun pendataan</p>	<p>1. Belum ada unit/ mobil operasional, sehingga saat kegiatan pinjam kendaraan Dinas milik Sekretaris Dinas</p> <p>2. Belum ada gudang penyimpanan bahan pokok daerah</p>	Adanya perhatian dari Kepala Daerah untuk menyediakan kendaraan Dinas untuk operasional lapangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR	50 %	1,973,984,500	30 Persen	45.806.900	<p>1. Adanya dukungan anggaran dan arah kebijakan;</p> <p>2. Terjalinnnya koordinasi dan singkronasi program dengan dinas yang membidangi ekspor;</p> <p>3. Potensi produk unggulan daerah</p>	<p>1. Belum terlaksananya pemetaan pasar tujuan ekspor;</p> <p>2. Belum terlaksananya kegiatan misi dagang untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk unggulan ekspor ke luar daerah;</p> <p>3. Kemampuan pelaku usaha dalam melakukan ekspor masih terkendala pada pengetahuan, mencari target pasar dan bersaing dengan produk lainnya.</p>	<p>1. Dilaksanakan kegiatan yang dapat menumbuhkan motivasi, peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan bagi calon-calon pelaku ekpor;</p> <p>2. Mengikuti kegiatan promosi maupun kegiatan misi dagang lainnya dengan tujuan memperkenalkan produk</p>

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	69.23 %	578,639,200	41 Persen	50.093.800	<p>1. Telah adanya 2 orang tenaga penera ahli di bawah UML Balangan yang merupakan pegawai berhak melaksanakan tera/tera ulang</p> <p>2. Dibukanya layanan metrologi legal secara umum (tidak lagi harus sesuai jadwal TTU pasar) sehingga masyarakat</p> <p>3. Terdapat Layanan informasi (via Whatsapp) dan Sosial Media untuk UML Kabupaten Balangan</p> <p>4. Dukungan Kerjasama dari stakeholder terkait dalam pelaksanaan tera/tera ulang</p>	<p>1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tera/tera ulang bagi wajib tera</p> <p>2. Tidak adanya ketentuan yang mengikat bersifat sebab-akibat agar pemilik UTTP wajib tera mengajukan tera/tera ulang</p>	Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan anggaran kas, sambil terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	25 %		26 Persen		<p>1. Telah adanya 1 orang tenaga pengawas kemetrologian ahli di bawah UML Balangan</p> <p>2. Antusiasme Peserta Penyuluhan Metrologi Legal sangat baik, didukung adanya tambahan praktik Alat UTTP dalam kegiatan meningkatkan antusiasme peserta yang hadir</p> <p>3. Narasumber sangat interaktif dalam menyampaikan materi</p> <p>4. Kerjasama baik dari seluruh anggota tim khususnya pihak kepolisian resor Balangan, Kejaksaan Negeri, Dinas PolPP dan Dinas terkait</p>	<p>1. Tidak semua peserta (pelaku usaha) dari berbagai desa yang diundang dapat hadir</p>	Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan anggaran kas, sambil terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait

NO	SKPD	Program Prioritas Kabupaten Tahun 2024			Realisasi S.d Tw II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
		Indikator	Target		K	Rp			
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL	7.88 %	50,600,000	4.8 Persen	11.020.000		1. Kegiatan Monitoring dan pendataan omzet UMKM keseluruhan belum tercapai di karenakan adanya kesibukan lain dari pihak UMKM pada saat kunjungan, 2. Belum optimalnya pembangunan kemitraan antara pelaku UMKM dengan pelaku jasa ritel modern	1. Mengatur jadwal ulang kunjungan dalam rangka monitoring dan pendataan omzet UMKM 2. Mengoptimalkan kembali hubungan antara pelaku jasa ritel modren dengan UMKM dengan menyelenggarakan acara temu UMKM
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	13 %	3,937,611,600	37.17 Persen	79.100.000	Tersedianya anggaran karena ada dukungan anggaran yang berasal pokir DPRD	Persyaratan Administrasi Belum Lengkap	Meminta kepada Pelaku Usaha Untuk segera melengkapi persyaratan Administrasi
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM	1.98 %	75,530,600	5.04 Persen	17.212.000	Tersedianya anggaran untuk Sertifikasi Halal dan Pendaftaran Merek/HAKI	Mencari Pelaku Usaha untuk Sertifikasi Halal dan Pendaftaran Merek/HAKI yang memenuhi kreteria persyaratan yang ada sulit.	Membuat pengumuman di media sosial tentang sertifikasi Halal gratis dan Pendaftaran Merek/HAKI gratis bagi IKM Kabupaten Balangan
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG	1.58 %	1,055,900,400	1.74 Persen	408.936.357	Masih besarnya antusias IKM yang ingin berkembang	Belum terlaksananya verifikasi IKM yang berkembang	Melaksanakan verifikasi IKM yang berkembang